

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI
PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA BATU BAGI
KAWASAN SEKITAR**

(Studi pada Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MUHAMMAD KHARIS JA'FAR ISMAIL
NIM. 125030800111014**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PARIWISATA
MALANG
2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	12
B. Tinjauan Teoritis	19
1. Kepariwisataaan	19
a) Pengertian Pariwisata	19
b) Pengertian Potensi Wisata	20
c) Pengertian Destinasi Wisata	20
d) Pengertian Wisatawan	21
2. Prasarana dan Sarana Pariwisata	22
a) Prasarana Pariwisata	22
b) Sarana Pariwisata	24
3. Prinsip dan Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataaan	25
4. Teori Perencanaan Pariwisata	25
5. Teori Pengembangan Pariwisata	28
6. Peran Serta Masyarakat dan Pihak Swasta	30
a) Peran Masyarakat	30
b) Peran Pihak Swasta	31
7. Arti Pentingnya Pariwisata bagi Perekonomian	31
8. Perubahan Kehidupan Masyarakat	33
a) Perubahan Sosial	33
b) Perubahan Ekonomi	34
9. <i>Community Based Tourism</i>	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Sumber data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian	46
G. Teknik Analisis Data	46
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
I. Teknik Pengambilan Data Pendukung	50
1. Indikator dan item Penelitian	50
2. Skala Pengukuran	53

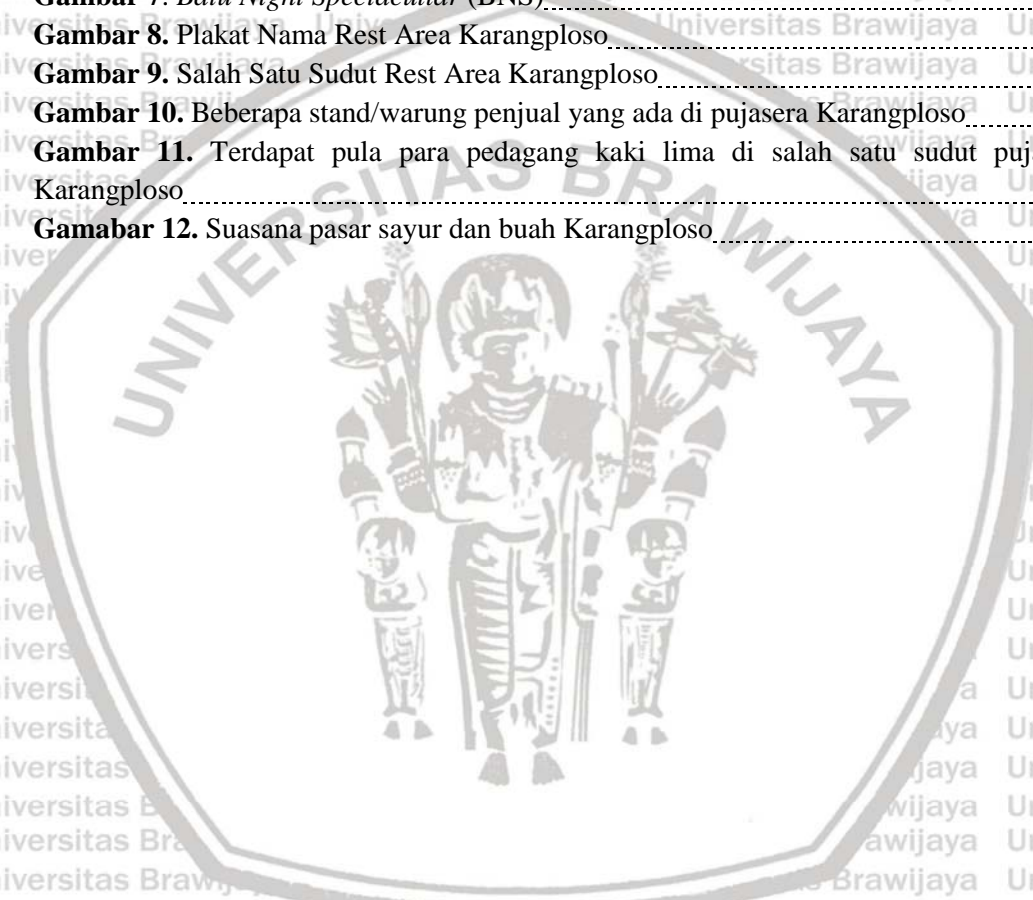
3. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	55
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1. Perkembangan Pariwisata di Kota Batu.....	57
a) Gambaran Umum Kota Batu.....	57
b) Objek Wisata di Kota Batu.....	58
c) Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Batu.....	61
2. Gambaran Umum Kecamatan Karangploso.....	62
a) Penduduk.....	63
b) Kondisi Geografis.....	64
3. Fasilitas Pariwisata di Kecamatan Karangploso.....	65
a) Rest Area Karangploso.....	66
b) Pujasera Karangploso.....	68
c) Pasar Sayur dan Buah Karangploso.....	69
B. Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata di Kota Batu terhadap Masyarakat Karangploso.....	70
1. Analisis Dampak Sosial.....	72
2. Analisis Dampak Ekonomi.....	83
C. Kondisi <i>Community Based Tourism</i> di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.....	96
1. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	97
2. Analisis Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pariwisata.....	105
3. Analisis Permasalahan yang Ditemukan oleh Peneliti.....	114
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sepuluh Besar Negara-Negara Pembelanja dan Penerima Uang dalam Industri Wisata	2
Tabel 2. Maping Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. Item penelitian untuk pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah	51
Tabel 4. Item penelitian untuk pengunjung (<i>visitor</i>)	53
Tabel 5. Skala Likert	54
Tabel 6. Interval Skala Likert	55
Tabel 10. Teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel	56
Tabel 11. Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Batu dari Tahun ke Tahun	62
Tabel 12. <i>Mean</i> data pendukung untuk dampak sosial para pelaku usaha	74
Tabel 13. <i>Mean</i> data pendukung untuk dampak sosial masyarakat yang tidak memiliki usaha di fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso	76
Tabel 14. Perbandingan kondisi sosial masyarakat Karangploso sebelum dan sesudah berkembangnya pariwisata di Kota Batu	81
Tabel 15. <i>Mean</i> data pendukung untuk dampak ekonomi para pelaku usaha	88
Tabel 16. <i>Mean</i> data pendukung untuk dampak ekonomi para masyarakat yang tidak memiliki usaha di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso	89
Tabel 17 : Perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Karangploso sebelum dan sesudah berkembangnya pariwisata di Kota Batu	96
Tabel 18. <i>Mean</i> data pendukung tentang partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pelaku Usaha)	101
Tabel 19. <i>Mean</i> data pendukung tentang partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Masyarakat)	101
Tabel 20. <i>Mean</i> data pendukung tentang partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pemerintah)	102
Tabel 21. <i>Mean</i> data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pelaku Usaha)	108
Tabel 22. <i>Mean</i> data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Masyarakat)	110
Tabel 23. <i>Mean</i> data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pemerintah)	112
Tabel 24. <i>Mean</i> data kuantitatif untuk indikator persepsi pengunjung (<i>visitor</i>)	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Triangulasi.....	49
Gambar 2. Wisata Agro Kebun Jeruk, Kota Batu.....	58
Gambar 3. Pemandangan Alam Kota Batu.....	59
Gambar 4. Bantengan, salah satu kesenian khas Jawa Timur.....	60
Gambar 5. Jawa Timur Park 1, Kota Batu.....	60
Gambar 6. Jawa Timur Park 2, Kota Batu.....	61
Gambar 7. Batu Night Spectacullar (BNS).....	61
Gambar 8. Plakat Nama Rest Area Karangploso.....	67
Gambar 9. Salah Satu Sudut Rest Area Karangploso.....	67
Gambar 10. Beberapa stand/warung penjual yang ada di pujasera Karangploso.....	68
Gambar 11. Terdapat pula para pedagang kaki lima di salah satu sudut pujasera Karangploso.....	69
Gambar 12. Suasana pasar sayur dan buah Karangploso.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrix Hasil Wawancara, Isu yang Diangkat, serta Kesimpulan dari Wawancara.

Lampiran 2. Tabel Distribusi Frekuensi Data Kuantitatif.

Lampiran 3. Pedoman wawancara.

Lampiran 4. Kuisisioner Penelitian untuk Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Lampiran 5. Kuisisioner penelitian untuk pengunjung (*visitor*).

Lampiran 6. Gambar.

Lampiran 7. Surat-surat terkait proses penelitian.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UNWTO (United Nation of World Tourism Organization) mendefinisikan tentang aktivitas pariwisata sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan *outbound* (keluar dari lingkungan asalnya) untuk tidak lebih dari satu tahun berlibur, berdagang, atau urusan lainnya (Hakim, 2004:1). Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Dalam perkembangannya, perjalanan wisata dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk keluar dari lingkungan asalnya untuk sementara tanpa didasari oleh tujuan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan mendesak lain yang menghambat seseorang untuk menikmati daerah tujuan berwisatanya.

Kecenderungan perjalanan keluar dari lingkungan asalnya ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1950, jumlah kedatangan wisatawan internasional diketahui meningkat bahkan mendekati dua puluh delapan kali, hingga mencapai 698 juta wisatawan pada tahun 2000. Peningkatan jumlah wisatawan global ini banyak didorong dengan semakin berkembangnya teknologi transportasi baik di darat, laut, maupun udara. Perkembangan teknologi transportasi ini otomatis memudahkan proses perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, baik jarak dekat maupun jarak jauh dengan tujuan tertentu, salah satunya adalah berwisata. Perkembangan transportasi udara memungkinkan orang-orang dari Amerika maupun Eropa mencapai negara-negara di berbagai

belahan dunia lain menjadi lebih singkat dan tidak melelahkan. Hal itu juga didukung dengan dibangunnya berbagai bandar udara baru di berbagai negara berkembang yang semakin memudahkan wisatawan untuk mengunjungi negara tersebut.

Menyadari potensi industri pariwisata bagi perekonomian membuat beberapa negara maju maupun negara berkembang dewasa ini terus meningkatkan usaha pengembangan sektor pariwisata di negara mereka. Berikut merupakan tabel sepuluh besar negara-negara pembelanja dan penerima uang dari sektor pariwisata.

Tabel 1. Sepuluh Besar Negara-Negara Pembelanja dan Penerima Uang dalam Industri Wisata

Pembelanja asal/wisatawan	% dari keseluruhan	Penerima devisa	% dari keseluruhan
US	14,0	US	18,0
Jerman	10,0	Spanyol	6,5
UK	7,7	Prancis	6,3
Jepang	6,6	Italia	5,8
Prancis	3,6	UK	4,1
Italia	3,2	Jerman	3,7
Kanada	2,6	Tiongkok	3,4
Belanda	2,5	Austria	2,4
Tiongkok	n.a	Kanada	2,3
Belgia/Luxemburg	n.a	Yunani	1,9
Total	50,2	Total	54,4

Sumber : Flavin (2002)

Pariwisata terutama pariwisata Internasional termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan

ekonomi. Sektor pariwisata diharapkan dapat mendongkrak pendapatan devisa, baik dalam pengeluaran uang para wisatawan di negara kita, maupun sebagai penanaman modal asing bagi industri pariwisata (Soemardjan, 1974:56). Hari Hartono (1974:45) menyebutkan bahwa di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah di bidang perhotelan, biro-biro perjalanan, pramuwisata atau pemandu wisata (*guides*), pusat-pusat rekreasi, serta instansi pariwisata pemerintahan yang juga memerlukan tenaga terampil.

Dampak positif lain dengan hadirnya pariwisata di suatu negara adalah perkembangan dan kemajuan kebudayaan, terutama pada unsur budaya, teknologi, dan sistem pengetahuan. Kemajuan teknologi yang diikuti dengan tingkat pengetahuan yang maju dapat membuat masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata lebih mampu menerima perubahan zaman dan juga modernisasi. (Soedarsono, 1991 : 3)

Dalam beberapa tahun terakhir pariwisata bagi Indonesia telah menjadi salah satu sektor strategis dalam sistem perekonomian nasional. Pariwisata juga dianggap memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Menurut Titin Soekarya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan IPTEK Kementerian Pariwisata sektor Kepariwisataan, saat ini pariwisata menjadi salah satu andalan utama pemerintah sebagai sumber penerimaan devisa negara. Titin Soekarya menyebutkan bahwa sektor pariwisata telah dijadikan andalan sumber devisa negara oleh pemerintah karena tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Sektor pariwisata juga bisa menghasilkan devisa yang besar hanya dengan menjual keindahan alam atau keanekaragaman budaya kepada para wisatawan, baik

wisatawan domestik maupun mancanegara, tanpa mengambil sesuatu dan merusak alam. (sumber : www.antaranews.com, berita hari Jumat, 23-07-2010)

Sebagai salah satu sektor strategis nasional, pariwisata memang mempunyai efek ganda yang ditimbulkan oleh aktifitas pariwisata. Efek tersebut dapat bersifat langsung seperti penyerapan tenaga kerja, maupun yang bersifat tidak langsung berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti rumah makan, penginapan, penjual aneka souvenir dan oleh-oleh khas daerah tujuan wisata, transportasi, dan jasa pelayanan publik lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Yoeti (2008 : 3) pengaruh pariwisata dalam negara-negara berkembang terlihat jelas seperti misalnya:

- a) Tumbuh dan berkembangnya usaha makanan, restoran, kafe yang bersifat lokal dan banyak diminati wisatawan
 - b) Tumbuh dan berkembangnya industri kecil seperti produk cinderamata khas daerah
 - c) Tumbuh dan berkembangnya usaha agen perjalanan untuk melayani wisatawan sampai di daerah tujuan wisata
 - d) Banyaknya usaha penginapan yang bermunculan seperti losmen, bungalow, hotel, dan juga villa.
- Situasi dan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini yang

memperlihatkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, serta semakin rusaknya lingkungan sebagai akibat dari kegiatan manufaktur dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengeksploitasi sumber daya alam, menjadikan sektor pariwisata perlu untuk lebih diprioritaskan dan dikembangkan sebagai salah satu sumber andalan. Pengelolaan sektor pariwisata secara benar selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, juga tidak merusak lingkungan, dan bahkan mendukung proses pelestarian lingkungan itu sendiri. Berbeda dengan sektor migas yang terus menerus mengandalkan ketersediaan bahan bakar fosil yang tidak terbaharui, sehingga semakin lama ketersediaan migas juga semakin

berkurang. Menurut Fandeli (1995:48), sumber daya pariwisata adalah unsur fisik lingkungan yang statik seperti : hutan, air, lahan, margasatwa, tempat-tempat untuk bermain, berenang dan lain-lain. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa perkembangan pariwisata sangat terkait dengan pelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam sekitar sebagai sasaran dan obyek wisata itu sendiri.

Berbagai peluang serta potensi kekayaan pariwisata tersebut yang menjadikan pengembangan pariwisata sangat penting untuk dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah yang dianggap lebih mengetahui potensi, peluang, dan permasalahan yang ada di daerahnya.

Sehubungan dengan disahkannya UU No.22 tahun 1999 yang telah diamandemen oleh UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan urusan kepentingan daerah secara mutlak telah menjadi wewenang pemerintah daerah, termasuk urusan kepariwisataan. Oleh karena itu setiap daerah dapat mengatur rumah tangga pemerintahannya secara aspiratif dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Hal tersebut juga berlaku di Malang Raya, dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut, secara kelembagaan pemerintah telah menyerahkan urusan kepariwisataan kepada pemerintah Malang

Raya yang dalam hal ini ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Dinas Pariwisata Kota Batu, dan Dinas Pariwisata Kota Malang. Di Wilayah Malang Raya sendiri pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu program dan prioritas utama pemerintah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Malang Raya memang memiliki potensi wisata yang sangat

melimpah. Tidak kurang dari 21 pantai indah di selatan Kabupaten Malang yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, diantaranya pantai Balekambang, pantai Sendang Biru, pantai Tiga Warna, dan lain sebagainya. Begitupun dengan Kota Batu yang saat ini telah ditetapkan sebagai kota wisata yang memiliki berbagai objek wisata menarik baik wisata alam maupun buatan yang saat ini sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia. Kota Malang juga memiliki objek wisatanya sendiri. Yang paling menonjol dari objek wisata di kota Malang adalah wisata budaya, wisata belanja, dan wisata kulinernya.

Tiga kota tersebut yang terafiliasi dalam satu wilayah Malang Raya memiliki kebijakan otonomi sendiri dalam usaha mengembangkan pariwisata kota masing-masing. Salah satu bagian dari Malang Raya yang saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan diri sebagai kota wisata adalah Kota Batu. Kota Batu sendiri berada di ujung barat Malang Raya yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di utara, dan Kabupaten Malang di selatan, barat, dan timur. Potensi Kota Batu sebagai kota wisata memang sangat melimpah. Mulai dari wisata alam seperti gunung Banyak, gunung Panderman, hingga wisata buatan seperti Museum Satwa, Museum Angkut, dan Batu *Night Spectacular* (BNS) telah menjadi destinasi primadona di Malang Raya dan Jawa Timur.

Kota Batu yang merupakan kota dataran tinggi tentunya sangat terbatas soal aksesibilitas, dimana Kota Batu sendiri tidak memiliki pelabuhan maupun bandara bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Batu. Satu-satunya akses masuk ke Kota Batu adalah via jalur darat. Kota Batu sendiri memiliki empat akses utama jalur darat yaitu melalui Kota Malang, melalui Kecamatan

Karangploso, melalui Kecamatan Ngantang, dan melalui Kabupaten Pasuruan.

Hal ini menyebabkan banyak kendaraan wisatawan yang berlalu-lalang di jalur-jalur tersebut.

Salah satu jalur yang saat ini mulai banyak dilewati wisatawan adalah jalur darat yang melalui Kecamatan Karangploso. Jalur alternatif ini seringkali mengalami peningkatan yang signifikan saat libur panjang maupun saat akhir pekan. Hal tersebut dikarenakan padatnya jalur utama Kota Malang sehingga wisatawan beralih menggunakan jalur alternatif. Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang juga telah membangun beberapa fasilitas pendukung pariwisata di Kecamatan Karangploso, salah satunya adalah *Rest Area* Karangploso, dengan alasan untuk menarik wisatawan yang datang atau pulang dari dan ke Kota Batu agar singgah sejenak di Kecamatan Karangploso. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, ada dua desa yang sebenarnya akan dicanangkan sebagai desa wisata di Kecamatan Karangploso sejak tahun 2002 lalu, namun batal dilaksanakan karena pemerintah yang kurang mendukung.

Selain itu masyarakat juga merasa belum terlalu maksimal dalam pemanfaatan fasilitas pariwisata tersebut, sehingga dampaknya terhadap masyarakat juga dirasa belum maksimal. (sumber *preliminary* peneliti)

Berdasarkan fenomena tersebut, Kecamatan Karangploso yang merupakan daerah sekitar Kota Batu berpotensi terkena dampak dalam segi sosial ekonomi dari pengembangan destinasi wisata di Kota Batu. Hal tersebut terlihat dari dibangunnya beberapa fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso yang menurut beberapa narasumber merupakan respon dari pemerintah untuk menjangring

pluang dari wisatawan yang menuju ke Kota Batu (sumber *preliminary* peneliti).

Latar belakang itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

empiris yang berjudul “**Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan**

Pariwisata di Kota Batu terhadap Kawasan Sekitar (Studi pada Kecamatan

Karangploso Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah dampak sosial ekonomi pengembangan pariwisata Kota Batu terhadap kawasan sekitar (Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)?
2. Bagaimana Community Based Tourism di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak sosial ekonomi pengembangan pariwisata di Kota Batu terhadap Kecamatan Karangploso.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi nilai-nilai CBT di Kecamatan Karangploso.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sehingga dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan sarana pariwisata .

b) Sebagai referensi serta masukan untuk pengembangan ilmu maupun penyempurnaan para peneliti selanjutnya dengan topik yang serupa.

2. Kontribusi Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dan pengelola *Rest Area* Karangploso dalam pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.

b) Sebagai tambahan khasanah kepustakaan Universitas.

c) Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir serta pengetahuan peneliti dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh di Perguruan Tinggi untuk dikomparasi dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi tulisan menjadi lima bagian/bab dalam proses penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat beberapa sub bab yang diantaranya latar belakang mengapa peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang analisis dampak sosial ekonomi pengembangan pariwisata di Kota Batu terhadap Kecamatan Karangploso, setelah itu ditentukan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang tinjauan empiris yang terdiri dari peneitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Bab ini juga membahas pengertian, teori-teori dan temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, internet, undang-undang maupun hasil penelitian (skripsi, thesis, dan juga disertasi) yang berkaitan dengan permasalahan dan topik yang disajikan pada BAB I. Teori-teori inilah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis hasil penyajian data dan fokus penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian yang kemudian diakhiri dengan metode analisis. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Pengumpulan data dengan cara angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dijelaskan tentang gambaran umum Kecamatan Karangploso, serta gambaran umum fasilitas pariwisata di Karangploso. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data wawancara sekaligus analisis dampak sosial ekonomi dan *community based tourism* masyarakat Karangploso sehubungan dengan pengembangan pariwisata di Kota Batu. Data dan analisis kuantitatif juga disajikan dalam BAB IV sebagai data pendukung hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari analisa dan interpretasi data, disertai kesimpulan dan saran-saran oleh peneliti sebagai masukan bagi pemerintah, masyarakat, maupun *stakeholder* lain di Kecamatan Karangploso untuk memaksimalkan dampak sosial ekonomi ke arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Zehrer, Kristin Hallman (2015)

Jurnal internasional hasil penelitian Zehrer dan Hallman (2015) yang berjudul *A Stakeholder Perspective on Policy indicators of Destination Competitiveness* membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya saing pariwisata sebagai elemen dasar, seperti sumber, manajemen destinasi, permintaan, serta situasi dan kondisi. Disaat tujuan model kompetisi masih terfokus pada peran bisnis, para pengusaha telah mulai menekankan betapa pentingnya kemampuan dalam bekerja sama antara para *stakeholder* destinasi pariwisata untuk mengembangkan daya saing. Hal ini penting karena mereka memiliki wewenang dalam hal pengembangan dan operasional destinasi. Berlandaskan teori stakeholder, jurnal ini mengelaborasi antara faktor-faktor manajemen dan kebijakan yang mempengaruhi daya saing suatu destinasi dilihat dari perspektif stakeholder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa beberapa faktor (seperti pandangan dan pengamatan) sangat berpengaruh positif terhadap daya saing suatu destinasi.

2. Robin Nunkoo dan Dogan Gursoy (2011)

Penelitian yang berjudul *Residents' Support for Tourism (An Identity Perspective)* membahas tentang dukungan warga untuk pariwisata telah banyak dilakukan di negara maju. Penelitian ini menganalisis dukungan masyarakat dalam perekonomian pulau Mauritius dengan menguji model yang didasarkan

pada teori pertukaran sosial dan teori identitas. Model tersebut mengusulkan bahwa identitas pekerjaan berbasis sumber daya, identitas lingkungan, dan jenis kelamin identitas warga mempengaruhi sikap terhadap dampak pariwisata dan dukungan (perilaku). Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas seseorang memiliki pengaruh langsung pada dukungan, tetapi mungkin tidak selalu mempengaruhi sikap. Temuan tersebut mengkonfirmasi relevansi teori pertukaran sosial dan identitas teori dalam menjelaskan dukungan masyarakat untuk pariwisata di negara kepulauan. Studi ini merupakan studi mplikasi praktis dan bahasan yang terbatas.

3. Fanggy Theresia Sumaco dan Scott Richardson (2011)

Penelitian Sumaco dan Richardson berjudul *An Analysis on International Tourists' Perceptions towards Destination Branding: "Visit Indonesia 2008"* *Marketing Campaign* bertujuan untuk menguji persepsi wisatawan internasional terhadap Indonesia, khususnya produk pariwisata dan posisi negara. Dalam hubungannya dengan "Visit Indonesia 2008", penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara apa yang negara coba untuk menawarkan dengan apa yang para wisatawan pikir mereka akan mendapatkannya. Meskipun pariwisata bukan merupakan sesuatu yang baru untuk negara ini, akan tetapi studi tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya . Sebanyak 400 kuesioner dibagikan kepada penumpang asing yang berangkat dari tiga bandara internasional utama di Indonesia dengan 342 menyelesaikan survei dengan tanggapan, sehingga memberikan tingkat tanggapan sebesar 85,5 % . Convenience sampling dipilih sebagai metode yang disukai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan . Data

diolah dengan SPSS dan hasilnya menunjukkan bahwa Kementerian Pariwisata perlu mengevaluasi kembali strategi pemasaran dan media pemasaran sebagaimana penelitian ini yang mengungkapkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kampanye ini.

4. Paul Fallon dan Peter Schofield (2005)

Komitmen dalam membangun suatu fasilitas dalam destinasi memainkan peran penting dalam mengevaluasi persepsi pengunjung dalam wisata. Hal inilah yang disoroti dalam artikel milik Paul Fallon dan Peter Schofield (2005) yang berjudul *The Dynamics of Destination Attribute Importance*. Artikel ini secara garis besar membahas tentang dinamika soal pentingnya penilaian atribut dan fasilitas destinasi yang berada di Orlando, Florida. Artikel ini juga membahas tentang temuan sebelumnya yang berkaitan untuk waktu, mengevaluasi metode alternatif untuk kepentingan pengukuran dan menilai kedua sensitivitas IPA serta pentingnya mengukur relevansi teori dari tiga faktor kepuasan pada tingkat destinasi. Tiga temuan utama muncul. Pertama, fitur penting dari Orlando tidak berubah secara signifikan selama liburan ataupun ketika meningkatnya tingkat kunjungan. Kedua, jenis ukuran dan sifat dinamis berkaitan dengan varian respon hasil pengaruh IPA. Ketiga, faktor hirarkis model untuk mengidentifikasi 'dasar', 'kinerja' dan 'kegembiraan' sebagai indikator kepuasan di kunjungan pertama kali dan pengeluaran pasar. Artikel ini menawarkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

Tabel 2. *Mapping* Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Hubungan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
1.	<i>A Stakeholder Perspective on Policy indicators of Destination Competitiveness</i>	Zehrer dan Hallman (2015)	Membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya saing pariwisata sebagai elemen dasar, seperti sumber, manajemen destinasi, permintaan, serta situasi dan kondisi.	Deskriptif Kuantitatif	Beberapa faktor (seperti pandangan dan pengamatan) sangat berpengaruh positif terhadap daya saing suatu destinasi.	Perspektif stakeholder dapat menjadi pertimbangan teoritis dari dampak pengembangan pariwisata terhadap kawasan sekitar yang notabene merupakan stakeholder dari pengembangan pariwisata itu sendiri.
2.	<i>An Analysis on Internationl Tourists' Perceptions towards Destination Branding: "Visit Indonesia 2008" Marketing</i>	Sumaco dan Richardson (2011)	Untuk menguji persepsi wisatawan internasional terhadap Indonesia, khususnya produk pariwisata dan posisi negara. Dalam hubungannya	Deskriptif Kuantitatif	Kementerian Pariwisata perlu mengevaluasi kembali strategi pemasaran dan media pemasaran sebagaimana penelitian ini yang mengungkapkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang	Ekspektasi wisatawan yang dibahas dalam jurnal ini dapat membantu peneliti dalam menentukan apa saja fasilitas yang telah dibangun di kawasan yang berpotensi terdampak pengembangan pariwisata

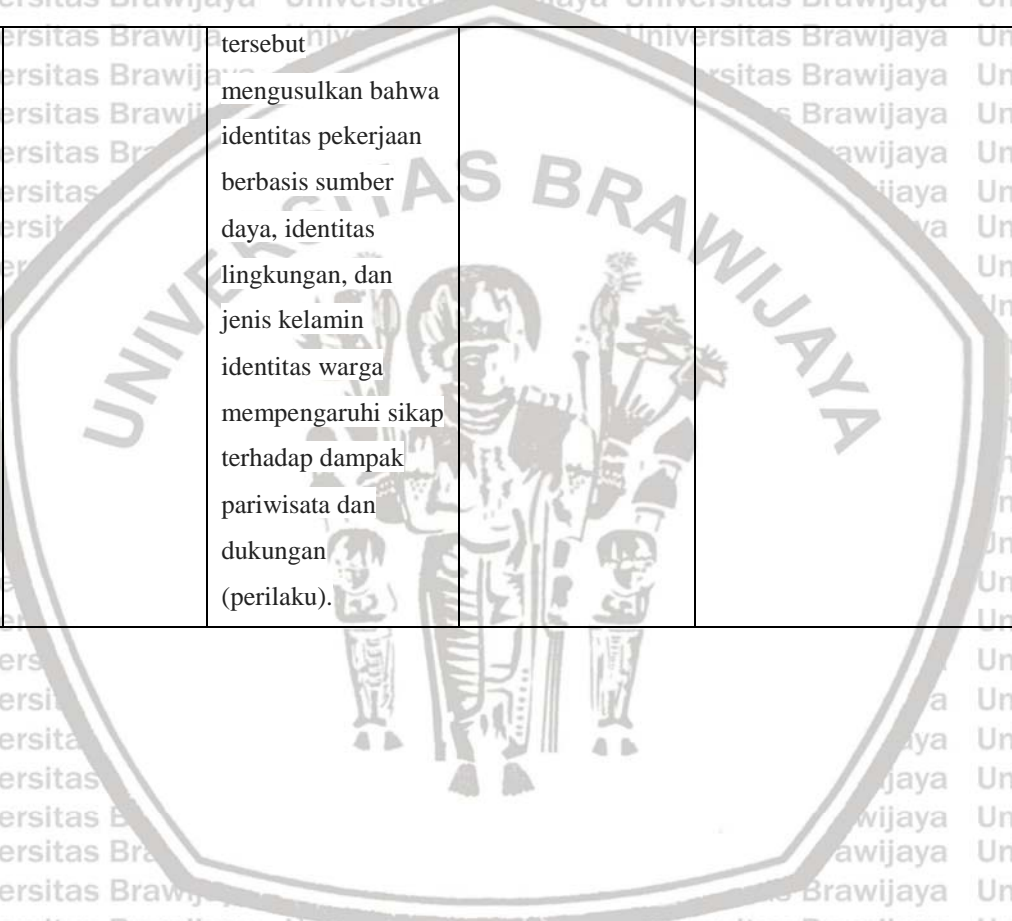
Lanjutan Tabel 2

	<p><i>Campaign</i></p>		<p>dengan "Visit Indonesia 2008", penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara apa yang negara coba untuk menawarkan dengan apa yang para wisatawan pikir mereka akan mendapatkannya.</p>		<p>kampanye ini.</p>	<p>di Kota Batu yang sesuai dengan ekspektasi wisatawan.</p>
<p>3.</p>	<p><i>The Synergies between Human Development, Economic Growth, and Tourism within a Developing Country: An Empirical Model for Ecuador</i></p>	<p>Rivera (2011)</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh pariwisata di Ekuador terhadap pengembangan ekonomi dan pembangunan manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>	<p>Metode co-integrasi dengan model koreksi kesalahan</p>	<p>1) Pariwisata tidak mempromosikan pembangunan manusia. Sebaliknya, itu adalah tingkat dan ukuran pembangunan manusia yang mempromosikan pariwisata dengan menciptakan hubungan yang miring.</p>	<p>Jurnal ini secara umum memiliki topik bahasan yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga banyak hal yang dapat digunakan sebagai pembandingan bagi penelitian yang akan dilakukan.</p>

Lanjutan Tabel 2

					<p>2) adanya siklus yang baik antara pengembangan manusia dan pertumbuhan ekonomi studi ini menemukan kausalitas searah yang mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata, artinya pertumbuhan pariwisata adalah produk dari pertumbuhan ekonomi tetapi tidak sebaliknya.</p>	
4.	<p><i>Residents' Support for Tourism (An Identity Perspective)</i></p>	<p>Robin Nunkoo dan Dogan Gursoy (2011)</p>	<p>Menganalisis dukungan masyarakat dalam perekonomian pulau Mauritius dengan menguji model yang didasarkan pada teori pertukaran sosial dan teori identitas.</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Identitas seseorang memiliki pengaruh langsung pada dukungan, tetapi mungkin tidak selalu mempengaruhi sikap.</p>	<p>Dukungan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat pengembangan pariwisata. Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh apa saja yang dapat timbul dari pariwisata.</p>

Lanjutan Tabel 2

		<p>tersebut mengusulkan bahwa identitas pekerjaan berbasis sumber daya, identitas lingkungan, dan jenis kelamin identitas warga mempengaruhi sikap terhadap dampak pariwisata dan dukungan (perilaku).</p>		
--	--	--	---	--

B. Tinjauan Teoritis

1. Kepariwisataan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan juga pengusaha.

a) Pariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Wahab dalam bukunya Pemasaran Pariwisata (1997:55), mendefinisikan istilah pariwisata sebagai berikut :

“Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, dan transportasi.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling penting bagi suatu negara. Berkat adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada bisa mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata tersebut.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan menarik sektor lain untuk berkembang pula, karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri

pariwisata. Layaknya sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor kuliner seperti warung-warung makan dan pedagang keliling, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.

b) Potensi Wisata

Menurut Sumihardjo (2008:12) yang dimaksud dengan potensi adalah sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendit (2005:21) menerangkan bahwa potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat dalam daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata. Artinya, potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki dari suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (*tourist attraction*) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya.

c) Destinasi Pariwisata

Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibanding dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (Pitana dan Diartha, 2009:126). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata dijelaskan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Yoeti (1996:178) menjelaskan ada unsur wajib yang harus dimiliki suatu daerah agar dapat menjadi daerah tujuan wisata :

1. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut “*something to see*” artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.
2. Daerah tersebut harus tersedia pula apa yang disebut “*something to do*” artinya tempat tersebut harus memfasilitasi wisatawan untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang ditawarkan oleh pengelola tempat wisata.
3. Daerah tersebut juga harus memiliki “*something to buy*” artinya daerah wisata tersebut harus memiliki sesuatu yang bisa dibeli, seperti makanan, minuman, oleh-oleh, souvenir, dan lain sebagainya

d) Wisatawan

Wisatawan memiliki kaitan erat dengan pariwisata. Suatu tempat dapat disebut sebagai obyek wisata atau merupakan daerah tujuan wisata jika terdapat wisatawan yang mengunjunginya. Dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata”. Menurut Burkart dan medlik (dalam Ross, 1998:36), wisatawan mempunyai empat (4) ciri utama, yaitu:

1. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di berbagai tempat tujuan.
2. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat tinggal dan tempat kerjanya sehari-hari, karena itu kegiatan wisatawan tidak sama dengan kegiatan penduduk yang berdiam dan bekerja ditempat tujuan wisatawan.

3. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan, karena itu perjalanannya bersifat sementara dan berjangka pendek.

4. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal untuk menetap ditempat tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah.

Sedangkan pengertian wisatawan menurut Cohen (dalam Ross, 1998:5) bahwa wisatawan adalah seorang pelancong yang melakukan perjalanan atas kemauan sendiri dan untuk sementara waktu saja, dengan harapan mendapat kenikmatan dari hal-hal baru dan perubahan yang dialami selama dalam perjalanan yang relatif lama dan tidak berulang.

2. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Salah satu unsur terpenting dari sebuah industri pariwisata adalah fasilitas pariwisata. Fasilitas pariwisata ini bisa diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan.

a) Prasarana Pariwisata (Infrastruktur)

Yang dimaksud dengan prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam (Yoeti, 1996:196). Prasarana ini menurut Lothar A.

Kreck (Yoeti, 1996:186-192) dibagi menjadi dua bagian penting :

1) Prasarana Perekonomian

a. Prasarana Transportasi (pengangkutan) : yaitu prasarana yang dapat membawa wisatawan dari tempat tinggalnya ke daerah tujuan wisata.

- b. Prasarana Komunikasi : yaitu sarana yang dapat mendorong wisatawan mengadakan perjalanan jarak jauh dengan adanya sistem komunikasi di daerah tujuan wisata. Seperti tersedianya jaringan komunikasi, telepon, kantor pos, dan lain-lain.
- c. Kelompok yang termasuk utilities : yang termasuk dalam kelompok ini adalah penerangan listrik, persediaan air minum bersih, sistem irigasi, dan lain sebagainya.
- d. Sistem Perbankan : seperti Bank, ATM, Money Changers

2) Prasarana Sosial : yaitu semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin prasarana perekonomian yang ada.

- a. Sistem Pendidikan : yaitu adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam pendidikan kepariwisataan.
- b. Pelayanan Kesehatan : perlunya koordinasi oleh Dinas Pariwisata setempat dengan dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap wisatawan yang berkunjung.
- c. Faktor keamanan : yaitu pelayanan dan fasilitas yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan.

b) Sarana Priwisata

Yoeti (1996:197-204) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberika pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung dan tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana Pariwisata ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- 1) Sarana Pokok Kepariwisataaan : yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Termasuk dalam kelompok ini adalah perusahaan angkutan wisata/travel agent, hotel dan jenis transportasi lain, restoran/rumah makan, toko-toko/kios, souvenir, asuransi pariwisata, *rest area*, dan lain-lain.
- 2) Sarana pelengkap kepariwisataan : yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang mestinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, namun yang terpenting adalah untuk membuat wisatawan semakin lama tinggal di suatu daerah tujuan wisata. Seperti sarana olah raga, sarana ketangkasan, sarana peribadatan, salon kecantikan, dan lain sebagainya.
- 3) Sarana penunjang kepariwisataan : yaitu perusahaan yang menunjang sarana pokok dan pelengkap pariwisata yang berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uang mereka di tempat yang dikunjunginya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Night Club, Streambaths, dan Casinos.

Keberadaan sarana-sarana pelengkap pariwisata tersebut seperti yang telah diuraikan diatas akan mendukung sarana-sarana pokok. Ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok sarana kepariwisataan tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Jika salah satu dari sarana tersebut terganggu atau tidak berfungsi dengan maksimal, maka usaha untuk melayani wisatawan juga dapat terganggu.

3. Prinsip dan Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Menurut UU Nomor 10 tahun 2009, BAB III Pasal 5, penyelenggaraan kepariwisataan pada hakikatnya diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Kepariwisataaan di dalam BAB II Pasal 4 yaitu : meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa. Prinsip dan tujuan tersebut harus menjadi dasar setiap Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataaan.

4. Teori Perencanaan Pariwisata

Perencanaan dalam tingkat yang sederhana adalah menetapkan suatu tujuan dalam memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya dalam tingkat yang lebih rumit dimana adanya pengaruh internal dan eksternal yang cenderung sulit untuk dikendalikan, perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang tidak dapat dikontrol (*noncontrolable*) yang relevan,

memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2005:3). Syarat-syarat perencanaan (Paturusi, 2008:10)

- a) Logis, bisa dimengerti dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku.
- b) Luwes (fleksibel) dan tanggap mengikuti dinamika perkembangan.
- c) Objektif, didasar tujuan dan sasaran yang dilandasi pertimbangan yang bersistem dan ilmiah.
- d) Realitas, dapat dilaksanakan.

Pengembangan pariwisata harus didahului dengan perencanaan sehingga ada pedoman pelaksanaan dan tolok ukur pencapaian tujuan pembangunan. Menurut Inskeep (dalam Yoeti, 2008:58) ada beberapa pendekatan perencanaan pembangunan pariwisata, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendekatan berkesinambungan, inkremental dan fleksibel : Pendekatan ini didasari kebijakan dan rencana pemerintah, baik tingkat nasional maupun regional. Perencanaan pariwisata dilihat sebagai suatu proses berkesinambungan yang perlu dievaluasi berdasarkan pemantauan dan umpan balik dalam kerangkapencapaian tujuan dan kebijakan pengembangan pariwisata.
- 2) Pendekatan sistem : Pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, demikian halnya dengan perencanaan dan teknik analisisnya. Komponen pariwisata sangat kompleks, dimana setiap komponen merupakan suatu sistem.
- 3) Pendekatan menyeluruh : disebut juga pendekatan holistik. Seluruh aspek yang terkait dalam perencanaan pariwisata yang mencakup institusi, lingkungan, dan implementasi sosial ekonominya, dianalisis dan direncanakan secara menyeluruh.

4) Pendekatan yang terintegrasi : Suatu pendekatan yang dihubungkan dengan sistem dan pendekatan menyeluruh, pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam dirinya dan juga terintegrasi dalam keseluruhan rencana dan total pola teladan dalam pengembangan suatu area. Pendekatan ini memandang kawasan sekitar kawasan wisata yang sedang direncanakan sebagai integral dalam perencanaan.

5) Pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan : pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan fisik dan sosial budaya. Analisa daya dukung adalah suatu teknik penting yang menggunakan pendekatan pengembangan berkelanjutan dan lingkungan. Beberapa pokok pikiran tentang interpretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu :

- a. pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memiliki perspektif ekologis,
- b. menunjukkan keberpihakan pada pembangunan skala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal/setempat,
- c. menempatkan DTW sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus mengeksploitasi daerah setempat,
- d. menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan peninggalan budaya di daerah tujuan wisata.

- 6) Pendekatan swadaya masyarakat : pendekatan ini melibatkan secara maksimum masyarakat lokal di dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, sampai pengelolaan pengembangan pariwisata.
- 7) Pendekatan implementasi : kebijakan rencana, rekomendasi, dan rumusan pengembangan pariwisata dibuat serealistis mungkin dan dapat diterapkan.
- 8) Penerapan proses perencanaan yang bersistem.

5. Teori Pengembangan Pariwisata

Menurut Pitana dan Diarta (2009:134), strategi teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompabilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal dan seterusnya.

Selanjutnya Spillane (1994 : 63) mengatakan bahwa pengembangan suatu objek wisata sebagai daerah tujuan wisata (*destination*), harus memperhatikan lima unsur penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanan wisatanya, lima unsur destinasi wisata tersebut meliputi :

- 1) Daya tarik dan atraksi wisata : Merupakan pusat dari industri pariwisata yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Biasanya wisatawan tertarik pada suatu destinasi karena suatu ciri khas tertentu. Ciri khas yang menarik wisatawan diantaranya : keindahan alam, iklim dan cuaca, kebudayaan, sejarah, sifat kedaerahan, kesukuan, dan kekhasan yang membedakan dengan tempat lain.

- 2) Fasilitas : Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah daya tarik berkembang. Fasilitas harus cocok dengan kualitas dan harga, penginapan, makanan,, dan minuman yang juga cocok dengan kemampuan membayar pengunjung / wisatawan.
- 3) Infrastruktur : Daya tarik dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah jika belum ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi baik di bawah maupun di atas tanah dari suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata antara lain : sistem pengairan / air, sumber listrik dan energi, jaringan komunikasi, sistem pembuangan kotoran / pembuangan air, jasa-jasa kesehatan, dan jalan.
- 4) Transportasi : Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, rambu-rambu ke lokasi, dan pelayanan pengangkutan lokal di tempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal. Sehingga dengan kemudahan tersebut dapat menarik minat wisatawan.
- 5) Keramahmatan : Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka jaminan keamanan dan kenyamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.

6. Peran Serta Masyarakat dan Pihak Swasta

a) Peran Masyarakat

Salah satu unsur penting dalam pengembangan pariwisata adalah peran serta masyarakat sekitar. Peran serta masyarakat oleh ahli sering disebut dengan partisipasi, yaitu keikutsertaan warga masyarakat dalam upaya-upaya pengembangan pariwisata. Pariwisata dalam sifatnya dapat dibedakan menjadi dua (Suwantoro, 2004 : 85) :

- a. partisipasi aktif : partisipasi yang dilakukan secara langsung baik secara perorangan maupun bersama-sama yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan reaksi mau melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan dan pembinaan rasa memiliki dari masyarakat
- b. partisipasi pasif : timbulnya kesadaran untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan wisata, baik terhadap wisatawan maupun atraksi wisata itu sendiri. Dalam peran serta pasif ini masyarakat cenderung hanya sekedar ikut mendukung terpeliharanya kelangsungan kegiatan wisata. Upaya peningkatan peran serta pasif dapat melalui penyuluhan maupun dialog oleh aparatur pemerintah maupun swasta, penyebaran informasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat sekitar kawasan wisata seperti pembangunan jasa penginapan/*home stay*, penyediaan warung makan, toko cinderamata, jasa pemandu atau penunjuk arah, fotografi, dan menjadi pegawai-pegawai usaha pariwisata.

b) Peran Pihak Swasta

Tidak bisa dipungkiri bila pengembangan sektor pariwisata dewasa ini telah menimbulkan berbagai dampak positif, terutama bagi perekonomian.

Masalahnya dalam pengembangan objek wisata dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Terkait dengan peran swasta, menurut Inpres RI nomor 9 tahun 1969 pasal 8 disebutkan bahwa ruang lingkup peran pariwisata ditunjukkan dalam usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam bidang pariwisata seperti usaha transportasi, akomodasi, *entertainment*, dan pelayanan lainnya pada wisatawan.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa peran swasta dalam memajukan pariwisata dinilai sangat besar. Pihak swasta yang memiliki usaha pariwisata seperti hotel, restoran, agen perjalanan dan berbagai bisnis lain yang mensupport dan meramaikan pariwisata, sedangkan pemerintah mempunyai peran dalam infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan sebagainya, dan masyarakat sebagai tuan rumah berperan menjaga kelestarian alam, memberikan keramah-tamahan (*hospitality*) rasa nyaman dan aman kepada wisatawan.

7. Arti Pentingnya Pariwisata dalam Perekonomian

Seperti telah disebutkan pada subbab sebelumnya, para wisatawan melakukan perjalanan wisata untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam. Jadi, memuaskan kebutuhan itulah yang menjadi dorongan bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan wisata dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu negara ke negara lain. Kegiatan orang-orang yang melakukan

perjalanan wisata memberi pengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat setempat atau negara yang dikunjungi.

Sebagai akibat lebih jauh dengan adanya lalu lintas orang-orang yang melakukan perjalanan wisata, ternyata memberi dampak terhadap perekonomian di negara yang dikunjungi. Dampak yang dimaksud antara lain adalah:

- a) Memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.
- b) Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- c) Meningkatkan pendapatan Nasional.
- d) Memperkuat posisi neraca pembayaran.
- e) Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mengembangkan industri pariwisata pada suatu negara bertujuan untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi sebagai akibat adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di negara tersebut. Mengutip laporan dari Estoril dalam (Yoeti, 1997:69) yang dikatakan sebagai berikut:

“Dalam hal mencari tempat-tempat untuk bersenang-senang, ada kecenderungan pada negara-negara sedang berkembang untuk menjadikan cahaya matahari (*sunshine*) dan laut (*sea or ocean*) sebagai daya tarik untuk berkunjung ke daerah tersebut. Dengan cara demikian pembangunan kepariwisataan menjadi suatu yang mudah untuk pembangunan ekonomi, yaitu hanya dengan mengeksploitasi keindahan alam untuk mengatasi kesukaran dalam defisit neraca pembayaran yang dialaminya”.

Terkadang kepariwisataan di anggap dapat memberikan hasil dengan mudah, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah dalam mengelolanya. Terutama untuk daerah-daerah yang memiliki iklim dan alam yang sangat bagus, tetapi tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat dikembangkan sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang baik bagi

wisatawan, meskipun potensi pariwisata tersebut tetap dapat dikembangkan apabila bisa ditangani dengan baik oleh semua pihak yang terkait.

8. Perubahan Kehidupan Masyarakat sebagai Dampak dari Pariwisata

a) Perubahan Sosial

Menurut Kanto (2006:4) konsep perubahan berhubungan dengan proses, perbedaan dan dimensi waktu. Dengan begitu proses perubahan sosial menunjuk pada suatu proses dalam sistem sosial dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur dan atau ditaati dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi bisa kearah kemajuan ataupun kemunduran. Perubahan sosial kearah kemajuan identik dengan konsep pembangunan yang umumnya merupakan dampak yang dikehendaki, sebaiknya dengan kemunduran merupakan hasil yang tidak diharapkan terjadi dalam masyarakat. Menurut Soekanto (1987:18) berdasarkan cepat lambatnya perubahan sosial dibedakan menjadi dua bentuk umum yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah proses perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kurangnya respon dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial yang mencakup unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung cepat. Dalam revolusi, perubahan dapat terjadi dengan direncanakan dan tidak direncanakan, dimana sering kali diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan sosial cepat atau lambat terjadi dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Suatu perubahan bergantung dan ditentukan oleh masyarakat sendiri.

Perubahan dapat berarti suatu perkembangan yang sesuai dengan tujuan atau dapat juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut membuat masyarakat perlu mengetahui mengapa perubahan dapat terjadi dan mengapa masyarakat perlu menanggapi atau menyesuaikan dengan perubahan.

Menurut Cohen (Hirawan 2008) dampak sosial pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam sepuluh kelompok besar, antara lain :

- a) dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi dan ketergantungan;
- b) dampak terhadap hubungan interpersonal antar anggota masyarakat;
- c) dampak terhadap dasar-dasar organisasi kelembagaan sosial;
- d) dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
- e) dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
- f) dampak terhadap pola pembagian kerja;
- g) dampak terhadap statifikasi dan mobilisasi sosial;
- h) dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
- i) dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial;
- j) dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Menurut WTO dalam Yoeti (1996:200) mengemukakan dampak sosial dari pariwisata adalah munculnya diferensiasi struktur sosial yang bersifat sosial yang meliputi munculnya transisi dan transformasi tenaga kerja dari *sector* pertanian ke *sector* jasa pariwisata, modernisasi *sector* pertanian, berkembangnya industri kerajinan, penurunan jurang pemisahan tingkat pendapatan dan persamaan kesempatan memperoleh pendidikan antar strata sosial.

b) Perubahan Ekonomi

Pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan pada beberapa daerah lebih mengarah kepada ekonomi, dimana dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi merupakan hal sangat berpengaruh terhadap semua kalangan, seperti

bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Menurut Yoeti (2008:53) pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadikan sector andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor-sektor lainnya yang terikat, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara dan penerimaan devisa meningkat melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang amat penting untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Cohen (Hirawan 2008) menyebutkan dampak pariwisata terhadap perekonomian dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, antara lain :

- a) Dampak terhadap penerimaan devisa;
- b) Dampak terhadap pendapatan masyarakat;
- c) Dampak terhadap kesempatan kerja;
- d) Dampak terhadap harga-harga;
- e) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan;
- f) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol;
- g) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya; dan
- h) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Menurut Pitana dan Gayantri yang dalam Suwena dan Widyatmaja (2010:30) dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian terhadap masyarakat lokal. Dampak positif Ekonomi antara lain membuka lapangan kerja, dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung dapat dipergunakan penduduk lokal, mendapatkan devisa melalui pertukaran mata uang asing dan mendorong seseorang untuk berwirausaha.

Pada dasarnya pelaksanaan peningkatan atau pembangunan ekonomi masyarakat tergantung pada usaha-usaha masyarakat, sehingga dapat menunjukkan

perannya dalam pembangunan sektor pariwisata. Perubahan ekonomi di suatu daerah pada umumnya terjadi karena adanya sistem pembangunan ekonomi.

Pembangunan sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu peningkatan sistem ekonomi yang telah ada sebelumnya, sehingga menjadi sistem ekonomi yang dianggap lebih baik guna meningkatkan pendapatan masyarakat ataupun pemerintah.

9. Community Based Tourism (CBT)

Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan pembangunan.

Definisi dari *Community Based Tourism* (CBT) itu sendiri yaitu :

1. Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata.
2. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha pariwisata juga mendapat keuntungan.
3. Menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan/pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada peran aktif masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat

lokal. Gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Menurut Suansri (2003 :12) prinsip dasar CBT antara lain

- A. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat,
- B. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek,
- C. Mempromosikan kebanggaan masyarakat,
- D. Meningkatkan kualitas hidup,
- E. Menjamin sustanbilitas lingkungan,
- F. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik,
- G. Membantu mengembangkan cross-cultural learning,
- H. Menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia,
- I. Mendistribusikan keuntungan secara adil diantara anggota masyarakat,
- J. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat.

Menurut Suansri (2003) prinsip *Community Based Tourism* dilihat dari beberapa segi antara lain :

- 1) Ekonomi
 - a. Terciptanya lapangan pekerjaan sektor pariwisata
 - b. Timbulnya pendapatan masyarakat lokal
 - c. Timbulnya dana komunitas
- 2) Sosial

- a. Peningkatan kualitas hidup
 - b. Peningkatan kebanggaan komunitas
 - c. Pembagian peran yang adil (gender, usia)
 - d. Mekanisme penguatan organisasi komunitas
- 3) Budaya
 - a. Mendorong masyarakat menghormati budaya lain
 - b. Mendorong pertukaran budaya
 - c. Budaya pembangunan
 - 4) Politik
 - a. Peningkatan partisipasi penduduk lokal
 - b. Peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas
 - c. Peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas
 - d. Mekanisme yang menjamin hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA
 - 5) Lingkungan
 - a. Pengembangan *carrying capacity*
 - b. System pembuangan sampah yang ramah lingkungan
 - c. Kepedulian terhadap konservasi

Ernawati (2010) mengemukakan *Community Based Tourism* adalah model manajemen kepariwisataan yang dikelola oleh masyarakat setempat yang berupaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya dan pada saat yang sama menciptakan dampak ekonomi yang positif. Masyarakat tinggal disekitar obyek dan daya tarik pariwisata, sesungguhnya penduduk adalah bagian dari atraksi wisata itu sendiri. Konsep CBT bermakna bahwa manajemen pariwisata ditempat bersangkutan dikelola oleh masyarakat setempat, ini meliputi pengelolaan kepariwisataan secara menyeluruh dilokasi tersebut, termasuk penyiapan semua produk/pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Cara tersebut memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat setempat, serta menempatkan mereka sebagai subyek kegiatan kepariwisataan bukan sebagai obyek.

BAB III

METODE PENELITIAN

Proses penelitian tentu membutuhkan metode penelitian yang sistematis dan tepat. Hal ini penting agar peneliti memperoleh data-data yang valid dan relevan, serta memperoleh informasi yang lengkap. Metode penelitian yang sesuai dapat menciptakan keyakinan akan suatu kebenaran hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

Metode dapat diartikan sebagai tata cara bagaimana penelitian dilaksanakan. Sedangkan penelitian adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan teliti dan sistematis, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran baru dari pengetahuan yang sudah ada. (Hasan, 2002:1). Nazir (2005:51) mengatakan bahwa metode penelitian adalah alat-alat untuk memandu peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan untuk membantu peneliti agar dapat diperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penyelidikan yang dilakukan secara berhati-hati melalui pengumpulan data yang sesuai untuk pemecahan suatu masalah.

A. Jenis Penelitian

Guna mencapai tujuan penelitian dan memperoleh hasil penelitian yang baik dan akurat, maka diperlukan sebuah metodologi penelitian yang sesuai dengan objek studi ilmu yang nantinya akan menjadi fokus dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala dari kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain pada masyarakat. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2005:8-13) mengemukakan karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu :

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (*instrument*)
3. Metode kualitatif
4. Analisa secara induktif
5. Teori dasar
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan dipecahkan. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, akurat, dan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala di masyarakat. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti hendak mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan tentang Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Destinasi Wisata Kota Batu terhadap Kawasan Sekitar (Studi pada Kecamatan Karangploso)

B. Fokus Penelitian

Penerapan fokus penelitian sebagai pusat dari sebuah penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga penelitian tersebut akan lebih terarah, bahasan dalam penelitian tidak terlalu

meluas serta relevan dengan objek yang akan diteliti, selain itu juga untuk membatasi studi dan memasukkan ataupun mengeluarkan suatu informan yang diperoleh di lapangan. (Moleong, 2000:62)

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Kecamatan Karangploso

- a) Letak administratif dan kondisi geografis
- b) Jumlah penduduk, pekerjaan, serta pendidikan
- c) Aksesibilitas dan fasilitas yang berkaitan dengan pariwisata

2. Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata di Kota Batu terhadap Kawasan Sekitar

- a) Dampak Sosial
- b) Dampak Ekonomi

3. Kondisi CBT di Kecamatan Karangploso

- a) Tingkat partisipasi masyarakat
- b) Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
- c) Persepsi visitor terhadap fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian, yaitu tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan

pertimbangan bahwa Kecamatan Karangploso merupakan salah satu kawasan yang dilalui oleh jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Hal ini membuat Kecamatan Karangploso sering sekali dilewati oleh kendaraan wisatawan baik yang menuju Kota Batu maupun yang pulang dari Kota Batu. Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang juga telah membangun beberapa fasilitas pendukung pariwisata di Kecamatan Karangploso, salah satunya adalah *Rest Area* Karangploso.

Disisi lain, intensitas kendaraan yang melewati Kecamatan Karangploso seringkali mengalami peningkatan yang signifikan saat libur panjang maupun saat akhir pekan. Hal tersebut dikarenakan padatnya jalur utama Kota Malang sehingga wisatawan beralih menggunakan jalur alternatif. Berdasarkan fenomena tersebut, Kecamatan Karangploso yang notabene merupakan daerah sekitar Kota Batu berpotensi terdampak dalam segi sosial ekonomi dari pengembangan destinasi wisata di Kota Batu. Dari pertimbangan tersebutlah peneliti memutuskan untuk menjadikan Kecamatan Karangploso sebagai lokasi penelitian.

Situs penelitian adalah letak peneliti mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah :

- 1) Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- 2) Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
- 3) Kantor Balai Desa Donowarih sebagai pengelola *Rest Area* Karangploso

4) Kawasan *Rest Area* Karangploso

5) Kawasan sekitar jalur alternatif Kabupaten Malang-Kota Batu

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari manakah data tersebut diperoleh atau didapatkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh di tempat penelitian, baik secara lisan maupun secara tertulis dari para responden dan informan. Data tersebut meliputi data kualitatif hasil observasi dan wawancara dengan informan, yakni :

- a) Kepala ataupun perangkat pengelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
- b) Kepala ataupun perangkat pengelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu.
- c) Pengelola dan pedagang *Rest Area* Karangploso.
- d) Masyarakat yang berjualan di sekitar *Rest Area* Karangploso, Pujasera Karangploso, dan Pasar sayur dan buah Karangploso.
- e) Pengunjung fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu semua data yang diperoleh bukan dari pihak pertama. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu pihak atau lebih yang bukan peneliti sendiri. Adapun data

pendukung ini antara lain berupa file-file, laporan, arsip, dokumen-dokumen baik pribadi maupun dokumen resmi, internet, dan juga sumber buku/majalah yang berhubungan dengan keperluan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2006:134). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Wawancara : Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber atau informan yang dapat mendukung dalam memberikan data yang dibutuhkan sesuai fokus penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara dan acuan-acuan yang ditetapkan untuk memudahkan peneliti. Menurut Hadi (dalam Muslimin, 2002:51), fungsi wawancara dapat digolongkan ke dalam tiga golongan besar:
 - a) Sebagai metode primer manakala wawancara dijadikan satu-satunya alat pengumpul data, atau sebagai metode yang diberi kedudukan yang utama dalam serangkaian metode-metode pengumpulan data lainnya.
 - b) Sebagai metode pelengkap jika wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data untuk mencari informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain.
 - c) Sebagai kriterium jika metode ini digunakan untuk menguji kemandapan hasil, kuisisioner, dan sebagainya. Dalam fungsi semacam itu, metode wawancara menjadi alat pengukur atau kriterium.

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pelengkap bagi metode observasi, angket, dan dokumentasi. Sumber wawancara ini merupakan orang-orang yang dianggap peneliti mampu memberikan penjelasan terkait apa saja yang menjadi fokus penelitian.

- 2) Observasi : Merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera, untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi untuk menganalisis dampak sosial ekonomi pengembangan pariwisata di kota Batu di kecamatan Karangploso. Menurut Tan dan Alfian (Muslimin, 2002:67) cara penelitian yang mengandalkan observasi amat penting, terutama jika penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbiasa untuk mengutarakan perasaannya, gagasan, maupun pengetahuannya. Dengan cara observasi, peneliti dapat lebih memahami pola pikir dan pola kehidupan masyarakat yang diteliti.
- 3) Angket/kuisisioner : yaitu penyebaran kuisisioner penelitian. Penentuan sample narasumber menggunakan pendekatan *purposive sampling*, *sensus*, dan *insidental sampling*. Metode pengambilan data berupa kuisisioner ini dilakukan untuk mendukung hasil data dari metode wawancara agar lebih akurat sekaligus menghilangkan keraguan terhadap hasil penelitian.
- 4) Dokumentasi : Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, internet, majalah, atau dapat juga berupa gambar dan catatan khusus yang relevan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk membantu peneliti dalam menggali data dan informasi pada saat penelitian. Menurut Moleong (2009:1168) dalam penelitian, manusia (peneliti itu sendiri) merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Instrumen dari penelitian ini antara lain :

- 1) Peneliti sendiri, dimana peneliti menjadi subjek penelitian dan sekaligus menjadi instrumen penelitian. Dengan berperan sebagai instrumen utama, diharapkan peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi mengenai apa yang sedang diteliti pada saat penelitian.
- 2) Pedoman wawancara sebagai garis besar dan panduan yang akan ditanyakan kepada pihak informan terkait penggalan data penelitian. Pedoman wawancara berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam rangka mencari data yang diinginkan.
- 3) Peralatan perekam dan tulis menulis yang membantu untuk melakukan perekaman dan pencatatan hal-hal penting ketika sedang melakukan penelitian di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Moloeng, 2009:280, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dengan suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah proses mendeskripsikan,

menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000:29). Miles dan Huberman (1992 : 16-21) menyebut langkah-langkah analisis kualitatif adalah sebagai berikut :

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung sampai laporan akhir tersusun.

b) Pengumpulan data

Merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Informasi atau data memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan metode yang berbeda-beda pula.

c) Pengolahan data

Merupakan proses manipulasi data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan

d) Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan sebagai kumpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah berupa gambar, tabel, dan teks uraian.

e) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung, dari awal sampai akhir penelitian. Dari data yang diperoleh di lapangan tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

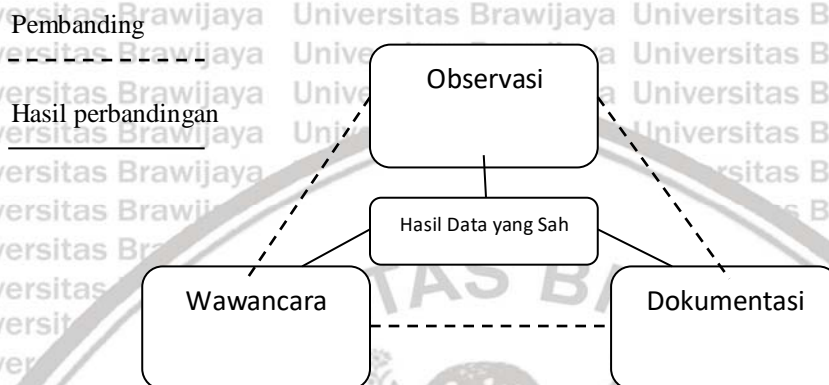
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi menjadi pilihan peneliti sebagai teknik pemeriksa keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemisahan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Moleong juga menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong 2004:330). Denzin (2001) membedakan empat macam triangulasi yaitu sumber, metode penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber mencoba membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicari dengan jalan :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang diungkapkan orang di depan umum dengan apa yang diungkapkannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain, seperti masyarakat yang berpendidikan menengah atau tinggi.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Secara umum, teknik triangulasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model triangulasi (Nasution 2003)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Cahyono dalam catatannya mengatakan bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik



triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.

Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.

K. Teknik Pengambilan Data Pendukung

Metode wawancara sebagai metode utama dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai data kualitatif yang cukup untuk digunakan sebagai data analisis deskriptif tentang dampak sosial ekonomi pengembangan pariwisata di Kota Batu terhadap masyarakat Karangploso. Meski begitu, peneliti merasa perlu untuk mengambil data kuantitatif sebagai data pendukung. Dengan didapatnya data kuantitatif tersebut peneliti berharap hasil penelitian ini akan lebih akurat sekaligus menghilangkan keraguan terhadap hasil penelitian.

Data kuantitatif tersebut diambil dari kuisisioner yang dibagikan kepada empat elemen yang berbeda yang memiliki kepentingan maupun berpotensi terdampak dari pengembangan pariwisata di Kota Batu, yaitu pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, serta pengunjung (*visitor*). Item yang digunakan dalam kuisisioner juga merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti membuat penggolongan dengan menjadikan fokus penelitian sebagai indikator sehingga item-item tersebut dapat digolongkan dengan mudah.

1. Indikator dan item Penelitian

Item penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang berupa pernyataan yang disusun berdasarkan indikator.

Penelitian ini menggunakan dua macam item yang diperuntukkan bagi dua golongan yang berbeda sesuai dengan porsi masing-masing. Yang pertama adalah

item penelitian untuk pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah yang dibuat sama. Hal ini karena ketiga elemen tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan mengetahui serta mengalami sendiri perubahan-perubahan sosial ekonomi setelah pembangunan pariwisata di Kota Batu berkembang pesat. Berikut merupakan item-item penelitian kuantitatif untuk pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah:

Tabel 3. Item penelitian untuk pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah.

No.	Indikator	Item
1.	Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata di Kota Batu terhadap Kawasan Sekitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya merasa bahwa pembangunan fasilitas pariwisata (Rest Area Karangploso, Pujasera Karangploso, pelebaran jalan, dsb.) merupakan upaya pemerintah untuk mengambil peluang dari pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu. 2. Saya merasa bahwa wisatawan Kota Batu belum banyak yang mengunjungi Rest Area Karangploso. 3. Saya merasa bahwa pengunjung Rest Area Karangploso mayoritas merupakan masyarakat sekitar. 4. Pedagang/pelaku usaha di Rest Area Karangploso mengalami peningkatan kualitas hidup setelah membuka usaha di Rest Area Karangploso. 5. Saya mengakui bahwa pedagang/pelaku usaha di Rest Area Karangploso mengalami peningkatan pendapatan setelah membuka usaha di Rest Area Karangploso. 6. Saya mengakui bahwa tingkat pengangguran masyarakat Karangploso menurun setelah dibangunnya Rest Area di Kecamatan Karangploso. 7. Saya mengakui bahwa para pedagang semakin mudah untuk menawarkan barang dagangannya setelah Rest Area Karangploso dibangun. 8. Saya merasa dampak positif dari dibangunnya Rest area di Karangploso masih belum merata. 9. Masyarakat yang tidak berdagang/memiliki usaha di Rest Area Karangploso dan sekitarnya tidak mengalami perubahan sosial ekonomi apapun setelah dibangunnya Rest Area Karangploso. 10. Saya merasa optimis dengan potensi pengembangan fasilitas pariwisata di

Lanjutan Tabel 3.

			Kecamatan Karangploso di masa yang akan datang.
2.	Kondisi <i>Community Based Tourism</i> di Karangploso	<i>Community Based</i> di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengakui bahwa partisipasi masyarakat Karangploso dalam kegiatan pariwisata masih kurang. 2. Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pariwisata di Kecamatan Karangploso hanya sebatas berdagang di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso 3. Saya mengakui bahwa mayoritas masyarakat Karangploso masih dalam tahap partisipasi pasif di bidang pariwisata. 4. Saya merasa bahwa pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa) belum melakukan bimbingan dan pelatihan tentang pariwisata kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata. 5. Saya mengetahui bahwa pemerintah dan pengelola Rest Area telah merencanakan berbagai program untuk mengembangkan Rest Area Karangploso. 6. Masyarakat tidak keberatan dengan dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. 7. Masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi lebih dalam kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso. 8. Saya merasa bahwa pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di Kecamatan Karangploso masih belum diperlukan. 9. Dengan langkah yang tepat, masyarakat Karangploso dapat menjadi masyarakat sadar wisata yang baik di masa depan. 10. Saya mendukung penuh Kecamatan Karangploso sebagai salah satu prospek pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang.

Sumber : Olahan peneliti.2017.

Selain item penelitian untuk kuisiner yang diberikan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah, peneliti juga menyusun kuisiner yang diperuntukkan bagi *visitor* yang berkunjung ke fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Kuisiner ini banyak memuat tentang bagaimana persepsi *visitor* terhadap fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Berikut merupakan item

persepsi *visitor* terhadap pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan

Karangploso :

Tabel 4. Item penelitian untuk pengunjung (*visitor*).

No.	Indikator	Item
1.	Persepsi <i>visitor</i> terhadap fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso	1. Saya merupakan wisatawan yang berniat menuju Kota Batu dan menggunakan Rest Area ini sebagai tempat beristirahat.
		2. Saya merupakan wisatawan yang berasal dari luar Malang Raya.
		3. Saya sengaja mengunjungi Rest area Karangploso dan menjadikan Rest area Karangploso sebagai destinasi tujuan saya.
		4. Saya merasa inisiasi untuk membangun fasilitas pariwisata di Karangploso ini cukup tepat.
		5. Saya mengakui bahwa fasilitas pokok (seperti toilet, mushola, gazebo) memiliki kondisi yang baik.
		6. Produk yang dijual di Rest Area Karangploso sesuai dengan kebutuhan saya.
		7. Saya merasa pembangunan Rest area Karangploso sangat bermanfaat bagi wisatawan.
		8. Pelayanan di beberapa Stand di Rest Area Karangploso cukup baik.
		9. Fasilitas jalan raya di Kecamatan Karangploso sudah sangat baik.
		10. Saya merasa perbaikan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso masih perlu dilakukan.
		11. Saya mendapatkan apa yang saya harapkan dari Rest area Karangploso.
		12. Saya merasa bahwa atraksi wisata di Rest Area Karangploso perlu ditambah.
		13. Saya merasa promosi Rest Area Karangploso masih sangat kurang.
		14. Saya setuju bahwa pengelola harus meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Rest area Karangploso kepada wisatawan.
		15. Saya bersedia datang kembali ke Rest area Karangploso di lain waktu.

Sumber : Olahan peneliti. 2017.

2. Skala Pengukuran

Metode ini menggunakan kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawab. Dalam kuisiner tersebut tercantum skala pengukuran di mana dalam metode ini digunakan Skala Likert. Menurut Malhotra (2009 : 298), Skala Likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden menandai derajat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing dari serangkaian obyek stimulus. Umumnya masing-masing item mempunyai lima kategori yang berkisar antara sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari positif sampai negatif, kemudian jawaban tersebut diberi skor :

1. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1
2. Jawaban tidak setuju diberi skor 2
3. Jawaban ragu-ragu/tidak tahu diberi skor 3
4. Jawaban setuju diberi skor 4; dan
5. Jawab sangat setuju diberi skor 5.

Tabel 5. Skala Likert

No.	Jenis Jawaban	Bobot/Nilai
1.	Sangat tidak setuju	1
2.	Tidak setuju	2
3.	Ragu-ragu / Tidak tahu	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat setuju	5

(Sumber :Malhotra 2009)

Rentang skor dalam skala Likert, interval jawaban adalah sebagai berikut :

$$Interval = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Interval kelas masing-masing kelas adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Interval Skala Likert

Interval	Keterangan
1.00 – 1.80	Sangat tidak setuju
1.81 – 2.60	Tidak setuju
2.61 – 3.40	Tidak tahu, netral
3.41 – 4.20	Setuju
4.21 – 5.00	Sangat setuju

Sumber : Olahan peneliti. 2017.

3. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Arikunto (2006 : 109) populasi adalah jumlah keseluruhan dari suatu gejala yang mempunyai karakteristik yang sama sedangkan menurut Hasan (2002 : 58) populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Metode kuantitatif ini menggunakan para pelaku usaha di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso, masyarakat sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, pemerintah lokal Kecamatan Karangploso dan Kabupaten Malang, serta pengunjung fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Desember 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggabungkan beberapa teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan sampel yang pertama adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan sampel yang diperlukan. Teknik *purposive sampling* pada penelitian ini dilakukan untuk mengambil sampel dari masyarakat dan pemerintah. Teknik pengumpulan sampel yang kedua adalah sensus. Sensus adalah teknik pengumpulan sampel yang menggunakan populasi sebagai sampel,

artinya peneliti mengambil semua populasi dan menjadikannya sebagai objek penelitian. Teknik sensus ini digunakan untuk mengambil sampel pada pelaku usaha di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Teknik pengumpulan sampel yang ketiga adalah *insidental sampling*. Teknik *insidental sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang didasari suatu kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu maka orang tersebut akan digunakan sebagai sampel, tentunya jika orang tersebut sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi sampel. Teknik *insidental sampling* ini digunakan untuk menentukan sampel pada pengunjung fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Tabel 10. Teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel.

No..	Objek penelitian	Teknik sampling	Jumlah sampel
1.	Pelaku usaha	Sensus	18
2.	Masyarakat	<i>Purposive sampling</i>	30
3.	Pemerintah	<i>Purposive sampling</i>	20
4.	Pengunjung	<i>Insidental sampling</i>	30
Total sampel			98

(Sumber : Hasil olahan peneliti)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Perkembangan Pariwisata di Kota Batu

a) Gambaran Umum Kota Wisata Batu

Kota Batu adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Kota Batu terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Kediri-Malang dan Jombang Malang.

Batasan wilayah Kota Batu yaitu : sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Blitar.

Wilayah Kota Batu berada di ketinggian 680-1200 m diatas permukaan laut dan diapit oleh tiga buah gunung yaitu Gunung Panderman (2010 mdpl), Gunung Arjuna (3339 mdpl), dan Gunung Welirang (3156 mdpl). Kondisi topografi yang demikian itu menjadikan Kota Batu sebagai Kota yang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan dingin. Rata-rata suhu udara di Kota Batu antara 15-22 derajat Celcius.

Luas wilayah Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 2.280 Ha atau sekitar 0,42% luas wilayah Jawa Timur. Kota Batu terbagi atas tiga kecamatan, 19 desa, dan lima kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 190.000 jiwa.

Sebagai kota yang daeahnya dikelilingi oleh gunung dan perbukitan, Kota Batu

memiliki berbagai objek wisata alam yang sangat menawan. Bukan hanya itu, Kota Batu juga memiliki berbagai objek wisata buatan yang sudah sangat terkenal di Indonesia.

b) Objek Wisata di Kota Batu

1. Wisata Agro

Kota Batu dikenal identik dengan berbagai wisata agro seperti : bungan, apel, stroberi, dan sayur mayur. Wisata Agro di Kota Batu dapat ditemui di desa Punten, Desa Buniaji, Desa Sumberbrantas, dan Kawasan Kususma Agrowisata.

Disaini wiatawan dapat merasakan layanan wisata oetik apel, jeruk, jambu merah, buah naga, stroberi, dan sayur mayur. Selain itu juga terdapat wisata 1000 bunga yang berada di Desa Sidomulyo.



Gambar 2. Wisata argo kebun jeruk Kota Batu (Sumber : google)

2. Wisata Alam

Kota Batu memiliki struktur dan bentangalam yang sangat cantik. Tak heran kot ini menjadi salah satu tujuan favorit wisata alam di pulau Jawa. Beberapa potensi alam yang dimiliki Kota Batu yaitu : air terjun Coban Rondo, Coban Pelangi, Coban Rais, Coban Talun, serta serta pemandian air panas alami Cangar.



Gambar 3. Pemandangan alam Kota Batu (Sumber : google)

3. Wisata Budaya

Kebudayaan di Kota Batu didominasi oleh kebudayaan Jawa Timuran, dimana budaya Jawa Timuran sangat identik dengan kesenian tari, ritual adat desa, serata pagelaran karnaval sebagai salah satu bentuk pesta rakyat.



Gambar 4. Bantengan, salah satu kesenian budaya khas Jawa Timur. (Sumber : google)

4. Wisata Buatan

Wisata buatan di Kota Batu menjadi salah satu yang paling terkenal di Indonesia.

Jatim Park Group selaku investor terbesar dari perkembangan pariwisata buatan di

Kota Batu mendominasi jumlah wisata buatan berskala besar. Wisata buatan di

Kota Batu antara lain Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2 (Batu Secret Zoo dan Museum Satwa), BNS, serta Predator Fun Park yang baru saja dibangun.



Gambar 5. Jawa Timur Park 1, Kota Batu. (Sumber : google)



Gambar 6. Jawa Timur Park 2, Kota Batu. (Sumber : google)



Gambar 7. Batu Night Spectacular (BNS) (Sumber : google)

c) Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Batu
 Jumlah kunjungan wisatawan Kota Batu dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini tak lepas dari terus dibangunnya objek-objek wisata baru serta gencarnya pemasaran baik dari pemerintah maupun swasta/investor. Berikut merupakan statistik kunjungan wisatawan Kota Batu hingga tahun 2015



Tabel 11. Jumlah Wisatawan Kota Batu tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Wisatawan
2012	2.000.000
2013	2.540.000
2014	3.290.000
2015	3.580.000

Sumber : BPS Kota Batu

Tabel tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan fasilitas, semakin mudahnya aksesibilitas, serta semakin berfariasinya destinasi wisata di Kota Batu menjadi salah satu faktor yang membuat pariwisata Kota Batu terus berkembang dari tahun ke tahun.

2. Gambaran Umum Kecamatan Karangploso

Kecamatan Karangploso adalah salah satu dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang terletak di belahan Utara Wilayah Kabupaten Malang serta dilalui jalur utama yang menghubungkan Kota Surabaya dan Kota Batu. Kecamatan Karangploso memiliki sembilan desa yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Karangploso. Kesembilan desa di kecamatan ini adalah Ampeldento, Bocek, Donowarih, Girimoyo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo, Tawangargo, dan Tegalgondo.

a) Penduduk

1) Jumlah

Kecamatan Karangploso memiliki luas 5.957.898 Ha (59.578,98 km²). Jumlah penduduk di kecamatan ini sampai tahun 2010 sebesar 74 585 jiwa.

Pertumbuhan penduduk sebesar 2,05 % antara tahun 2000 hingga 2010 dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 1,251 jiwa per km². Jumlah tersebut terhitung sangat kecil, hal ini dikarenakan mayoritas wilayah Kecamatan

Karangploso didominasi oleh sawah, kebun, dan hutan yang tersebar di sembilan desa yaitu Ampeldento, Bocek, Donowarih, Girimoyo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo, Tawangargo, dan Tegalgondo.

2) Komposisi

Masyarakat di Kecamatan Karangploso merupakan masyarakat pribumi yang memang sejak lama tinggal di daerah tersebut atau pindahan dari daerah sekitarnya. Masyarakat Karangploso dikenal sebagai masyarakat yang religius, guyub, rukun, dan menjunjung tinggi asas gotong royong antar-warga.

Komposisi etnik masyarakat Karangploso didominasi oleh suku Jawa serta sebagian kecil suku Madura, Arab, dan Tionghoa.

3) Agama

Sebagian besar masyarakat Karangploso memeluk Islam sebagai agamanya, dengan persentase 99%. Agama lain seperti Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu sebagai minoritas yang jumlahnya sangat sedikit. Masyarakat Karangploso dikenal taat dalam beragama. Banyak masjid-masjid dibangun sebagai sarana beribadah masyarakat muslim disana. Selain itu, banyak

sekolah-sekolah keagamaan yang digunakan sebagai pusat pembelajaran agama bagi masyarakat.

4) Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran menjadi dialek sehari-hari masyarakat Karangploso. Sebagian orang masih menggunakan bahasa Jawa Kromo sebagai bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tua maupun orang asing. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Karangploso masih menjunjung tinggi tata krama dalam berbahasa. Sebagian anak muda juga menggunakan bahasa *walikan* atau bahasa terbalik, yaitu pengucapan bahasa sehari-hari yang susunan hurufnya dibalik-balik sehingga memiliki pengucapan yang berbeda. Bahasa *walikan* merupakan bahasa khas masyarakat Malang Raya.

b) Kondisi Geografis

1) Geografi

Kecamatan Karangploso terletak di ketinggian 550 m DPL dengan suhu rata-rata berkisar 25-27 derajat celsius. Oleh Karena itu, Kecamatan Karangploso termasuk kawasan yang sejuk dan cenderung dingin karena terletak pada dataran tinggi.

2) Batas Administrasi

Batasan wilayah administrasi di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kota Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Junrejo Kota Batu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

3) Aksesibilitas

Kecamatan Karangploso merupakan salah satu jalur darat utama untuk menuju Kota Wisata Batu. Kecamatan Karangploso berada diantara jalan besar Malang-Surabaya yang langsung tembus ke Kota Batu. Ini membuat wisatawan yang berasal dari kawasan utara (Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya) lebih memilih jalur Karangploso untuk berekreasi ke Kota Batu. Kondisi jalan raya menuju Karangploso sudah sangat baik karena telah dilakukan pelebaran jalan pada tahun 2013 lalu. Angkutan umum juga sudah tertata dengan cukup baik dengan beroperasinya angkutan umum Karangploso-Batu (berwarna kuning), Karangploso-Singosari (berwarna putih), dan Karangploso-Arjosari (berwarna merah).

3. Fasilitas Pariwisata di Kecamatan Karangploso

Kecamatan Karangploso memiliki beberapa fasilitas pariwisata yang saat ini telah selesai dibangun maupun yang masih dalam proses pembangunan. Fasilitas-fasilitas pariwisata ini berdiri di tanah pemerintah Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, maupun Desa Donowarih sebagai desa yang paling banyak memiliki fasilitas pariwisata. Fasilitas tersebut dibangun untuk menarik wisatawan yang akan pergi dari Kota Batu maupun wisatawan yang akan pulang dari Kota Batu agar berkunjung ke Kecamatan Karangploso.

Berikut merupakan fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di Kecamatan Karangploso :

a) *Rest Area* Karangploso

Rest Area Karangploso adalah salah satu dari tiga *Rest Area* yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malang selain *Rest Area* Poncokusumo dan *Rest Area* Ngantang. *Rest Area* Karangploso dibangun diatas lahan bengkok (kas) Desa Donowarih. Terletak di area strategis berdekatan dengan pasar semi-modern Karangploso, pasar buah Karangploso, dan pasar sayur Karangploso, *Rest Area* Karangploso-pun diplot sebagai fasilitas utama pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Rest Area ini memiliki luas 2,3 hektar, memiliki 38 kios, delapan gazebo, dan taman bermain sebagai fasilitas utama. *Rest Area* ini juga dilengkapi minimarket, restoran, serta mushola demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Tak ketinggalan tentu saja toilet umum dengan air yang lancar.

Pembangunan *Rest Area* Karangploso memang masih berjalan hingga saat ini. Menejemen berencana menambah bangunan di sisi selatan dimana nantinya akan dibuat jalan tembus menuju Pasar Buah dan Sayur Karangploso yang kemudian menyatukan fasilitas-fasilitas tersebut.



Gambar 8. Plakat nama Rest Area Karangploso. (Sumber : dokumentasi peneliti)



Gambar 9. Salah satu sudut Rest Area Karangploso. (Sumber : dokumentasi peneliti)



b) Pujasera Karangploso

Pujasera Karangploso adalah satu dari beberapa fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Pujasera ini memiliki beberapa kios makanan dan minuman yang juga cukup sering dikunjungi wisatawan maupun masyarakat sekitar. Pujasera ini terletak di samping *Rest Area* Karangploso, tepatnya di sebelah timur.

Pujasera Karangploso memang tidak terlalu luas, namun Pujasera ini memiliki fasilitas yang cukup baik. Selain kios-kios makanan yang menyajikan pemandangan persawahan, ada pula musholla dan toilet umum bagi pengunjung. Selain itu, pujasera ini juga memiliki lahan parkir yang cukup luas.



Gambar 10. Beberapa stand/warung penjual yang ada di pujasera Karangploso

(Sumber : dokumentasi peneliti)



Gambar 11. Terdapat pula para pedagang kaki lima di salah satu sudut pujasera Karangploso. (Sumber : dokumentasi peneliti)

c) Pasar sayur dan buah Karangploso

Malang Raya dikenal sebagai salah satu penghasil buah-buahan dan sayur mayur terbesar di Jawa Timur. Terlebih dengan letak Malang Raya yang berada di dataran tinggi membuat berbagai macam tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Pasar sayur dan buah ini rencananya akan terus dilakukan pembangunan berkelanjutan agar pasar buah dan sayur ini memiliki fasilitas yang lebih memadai serta menambah kapasitas agar dapat menampung lebih banyak petani lokal.



Gambar 12. Suasana pasar sayur dan buah Karangploso (Sumber : dokumentasi peneliti)

B. Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata di Kota Batu terhadap Masyarakat Karangploso

Pariwisata merupakan salah satu industri yang sejatinya memiliki dampak yang sangat luas, termasuk dari segi sosial ekonomi. Dampak dari pariwisata sendiri bukan hanya terjadi di sekitar destinasi saja, namun juga di kawasan lain yang dilewati oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa *stakeholder* di Kecamatan Karangploso. *Stakeholder* tersebut yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Karangploso (*visitor*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Karangploso merasakan dampak sosial ekonomi akibat pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, dimana sebenarnya fasilitas tersebut dibangun untuk menjangkau peluang dari berkembangnya pariwisata di Kota Batu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Djayusman, SH, MM selaku KASUBAG Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

“Sebenarnya Rest Area Karangploso ini diposisikan sebagai pusat oleh-oleh, begitupun dengan pasar sayur dan buah yang ada disana. Nantinya diharapkan wisatawan yang dari Batu maupun menuju Batu dapat mampir ke Rest Area untuk beristirahat, berbelanja, dan menikmati atraksi wisata yang ada disana. Tentunya semua kegiatan tersebut berorientasi masyarakat, artinya mulai dari penjual, pengelola, penyaji atraksinya juga, semua dari masyarakat.” (Wawancara, 15 September 2016)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pengelola *Rest Area* Karangploso, Bapak Sujoko.

“Rest Area Karangploso ini dibangun di tanah bengkok (kas) desa atas saran dari pak Bupati. Tujuannya agar masyarakat Donowarih khususnya mendapat penghasilan tambahan selain bertani dengan menjual berbagai

oleh-oleh yang nantinya bisa ditawarkan kepada wisatawan yang pulang dari Kota Batu.”(Wawancara, 23 Agustus 2016)

Dari data hasil wawancara yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso berdampak langsung terhadap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, pembangunan fasilitas pariwisata tersebut merupakan dampak langsung dari pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Batu. Artinya jika diambil hubungan antara perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu, maka pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu berdampak secara tidak langsung terhadap masyarakat Karangploso.

Lebih lanjut, masyarakat Karangploso tidak merasakan dampak yang signifikan dari kunjungan wisatawan Kota Batu ke Karangploso. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki stand ataupun tidak berjualan di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Justru kebanyakan dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya perubahan ekonomi yang dirasakan oleh pedagang makanan lebih dikarenakan oleh terkonsentrasinya masyarakat pada fasilitas pariwisata tersebut, sehingga membuat pedagang lebih mudah dalam menawarkan dagangannya. Namun para pedagang menyangsikan adanya dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh wisatawan kota Batu secara langsung. Mereka menganggap selama ini fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wisatawan.

Meski begitu, peneliti tetap menemukan beberapa dampak sosial ekonomi masyarakat yang merupakan dampak tidak langsung dari pesatnya pengembangan

pariwisata di Kota Batu. Berikut merupakan dampak sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

1. Analisis Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan salah satu dampak yang selalu muncul dalam setiap perubahan yang dialami oleh masyarakat, baik itu bagi masyarakat secara keseluruhan maupun sebagian masyarakat saja. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Karangploso merupakan bagian dari dampak yang ditimbulkan oleh gencarnya pembangunan pariwisata di Kota Batu. Tentunya dalam setiap fenomena terdapat dua kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Begitupun dengan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan, dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Karangploso sehubungan dengan perkembangan pariwisata di Kota Batu tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga dampak negatif.

Masyarakat Karangploso merasakan peningkatan kualitas hidup sejak pemerintah Kabupaten Malang dan Kecamatan Karangploso mulai membangun beberapa fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, masyarakat Karangploso yang juga membuka usaha persewaan sepeda motor mini untuk anak-anak di kawasan *Rest Area* Karangploso.

“Peningkatan kualitas hidup ada, walaupun tidak banyak. Tapi Alhamdulillah, memang setelah Rest Area Karangploso ini dibangun, saya dan teman saya ini bisa mendapatkan pendapatan tambahan walaupun tidak seberapa.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Namun saat diberi pertanyaan tentang seberapa besar dampak dari pengembangan pariwisata di Kota Batu, beliau menyampaikan pendapat yang berbeda.

“Kalau pariwisata Kota Batu tidak ada hubungannya sama disini mas. Wisatawan Kota Batu kebanyakan cuma lewat saja. Cuma sedikit yang mampir lewat ke Rest Area tapi nggak lama. Kebanyakan yang ke Rest Area masih masyarakat sekitar sini.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Pak Sutris. Beliau merupakan salah satu pengelola taman bermain anak-anak yang berada di sekitar kawasan Rest Area Karangploso.

“Perbaiki kualitas hidup pasti ada. Seperti anak-anak ini yang sebelumnya menganggur jadi punya kegiatan di akhir pekan. Yaa, ada lah sedikit-sedikit tambahan penghasilan mas.” (Wawancara 11 Oktober 2016)

“Batu itu kan nggak ikut sini ya mas, jadi menurut saya nggak ada campur tangan Kota Batu. Tapi ada beberapa wisatawan yang tujuannya ke Batu terus mampir sebentar disini.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Pendapat para pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa memang ada perubahan kualitas hidup ke arah positif yang terjadi semenjak dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Namun perubahan tersebut tidak terlalu signifikan. Perubahan kualitas hidup tersebut meliputi : perubahan kegiatan menuju kegiatan yang lebih produktif, kemudahan aksesibilitas karena perbaikan infrastruktur, serta semakin mudahnya masyarakat menawarkan produk usahanya karena memiliki tempat menawarkan produk yang terpusat.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bisri, salah satu penjual makanan ringan di kawasan sekitar Pujasera Karangploso.

“Kalo sekarang tempat jualannya kan pasti mas. Jadi berangkat dari rumah sudah tahu akan jualan dimana. Kalo dulu sebelum ada Rest Area ini masih cari-cari tempat buat jualan.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibu Suratin, pedagang makanan di pujasera Karangploso. Beliau menyebutkan bahwa dagangannya semakin laris setelah dijual di pujasera Karangploso.

“Ada peningkatan mas kalo dibandingkan dengan yang dulu. Sekarang tempat jualannya sudah bersih, luas, tertata. Alhamdulillah meskipun ramainya juga cuma di hari-hari tertentu saja.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya kemudahan dalam berdagang yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa dengan dibangunnya fasilitas tersebut, konsumen dapat berkumpul dengan lebih mudah, sehingga mereka dapat menawarkan dagangan mereka dengan lebih mudah. Berikut merupakan hasil olahan data pendukung.

Tabel 12. Mean data pendukung untuk dampak sosial para pelaku usaha.

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya merasa bahwa pembangunan fasilitas pariwisata (Rest Area Karangploso, Pujasera Karangploso, pelebaran jalan, dsb.) merupakan upaya pemerintah untuk mengambil peluang dari pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu.	82	4.55	Sangat Setuju
2.	Saya merasa bahwa wisatawan Kota Batu belum banyak yang mengunjungi Rest Area Karangploso.	55	3.05	Tidak tahu
3.	Saya merasa bahwa pengunjung Rest Area Karangploso mayoritas merupakan masyarakat sekitar.	58	3.22	Tidak tahu
4.	Pedagang/pelaku usaha di Rest Area Karangploso mengalami peningkatan kualitas hidup setelah membuka usaha di Rest Area Karangploso.	73	4.05	Setuju

(Sumber: Olahan peneliti)

Menurut hasil olahan data pendukung, semua pelaku usaha mengakui bahwa pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso merupakan upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk merespon pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan olahan data kualitatif yang menunjukkan bahwa item pertama memiliki rata-rata 4,55 yang berarti sangat setuju. Berbeda dengan item tentang pengunjung. Para pelaku usaha berbeda pendapat tentang asal pengunjung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mereka masih belum bisa membedakan masyarakat yang mengunjungi fasilitas pariwisata di Karangploso sebagai wisatawan Kota Batu atau hanya masyarakat sekitar/bukan wisatawan yang akan menuju ke Kota Batu.

Dari sisi masyarakat yang tidak memiliki *stand* maupun berdagang di sekitar fasilitas pariwisata Karangploso, dampak sosial ini justru tidak terlalu dirasakan.

Seperti yang disampaikan oleh Bu Ani, salah satu warga desa Donowarih Karangploso.

“Nggak ada yang berubah mas, kecuali memang sekarang jalannya sudah bagus, kendaraan juga sudah ramai. Mungkin karena memang banyak wisatawan yang lewat sini. Daerah sini juga makin ramai karena banyak orang jualan. Tapi memang nggak punya dampak sosial apapun.”
(Wawancara, 8 Oktober 2016)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Siti. Beliau memiliki warung makan di pinggir jalan raya Karangploso, sekitar 100 m dari *Rest Area* Karangploso.

“Jalanannya sudah bagus mas, sudah lebar. Banyak kendaraan yang lewat. Tapi cuman sekedar lewat saja mas. Dampaknya nggak ada ke kami. Paling satu atau dua wisatawan yang datang ke sini, selebihnya orang-orang sekitar sini saja mas.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan hasil olahan data pendukung tentang dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa tidak banyak hal yang berubah setelah Kota Batu membangun pariwisatanya, meskipun ada beberapa hal yang mengalami perbaikan dari sebelumnya. Berikut merupakan hasil olahan data pendukung tentang dampak sosial pada masyarakat.

Tabel 13. *Mean* data pendukung untuk dampak sosial masyarakat yang tidak memiliki usaha di fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso.

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya merasa bahwa pembangunan fasilitas pariwisata (Rest Area Karangploso, Pujasera Karangploso, pelebaran jalan, dsb.) merupakan upaya pemerintah untuk mengambil peluang dari pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu.	116	3.86	Setuju
2.	Saya merasa bahwa wisatawan Kota Batu belum banyak yang mengunjungi Rest Area Karangploso.	103	3.43	Setuju
3.	Saya merasa bahwa pengunjung Rest Area Karangploso mayoritas merupakan masyarakat sekitar.	105	3.50	Setuju
4.	Pedagang/pelaku usaha di Rest Area Karangploso mengalami peningkatan kualitas hidup setelah membuka usaha di Rest Area Karangploso.	110	3.66	Setuju

(Sumber: Olahan peneliti)

Hasil tersebut menjelaskan bahwa memang dampak sosial juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki usaha di sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Salah satu yang paling mudah diamati adalah banyaknya masyarakat yang juga mulai membuka usaha setelah jalan raya Karangploso-Batu dirasa mulai ramai, meskipun letaknya relatif jauh dari pusat fasilitas pariwisata Karangploso. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat merasa terdampak dalam hal peningkatan kualitas hidup dibanding sebelumnya. Dampak tersebut tentunya tidak sebesar dampak yang dialami oleh para pelaku usaha yang berjualan di area fasilitas pariwisata Karangploso.

Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat juga memiliki sisi negatif. Sisi negatif ini berhubungan dengan pergaulan generasi muda di Kecamatan Karangploso yang kini memiliki tempat *nongkrong* baru, yaitu di *Rest Area* Karangploso dan sekitarnya. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena masyarakat Karangploso

yang dikenal religius takut para generasi muda akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma.

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Ibu Suratin, pedagang makanan di pujasera Karangploso. Beliau sering mengamati aktivitas anak-anak muda yang sering nongkrong di sekitar *Rest Area* Karangploso saat malam hari.

“Itu mas, kalo malam banyak anak-anak yang nongkrong disana (Rest Area). Aduuh kalo malam ngumpul disitu, ketawa-ketawa, rokokan sampai malam. Takutnya kalo nanti ada kriminalitas.” (Wawancara, 8 Oktober)

Kekhawatiran ini memang cukup beralasan, pasalnya peneliti sendiri saat mengunjungi *Rest Area* Karangploso juga melihat sendiri banyak anak-anak muda yang *nongkrong* di sekitar *Rest Area*, bahkan hingga pukul 11 malam. Sayangnya, peneliti tidak berhasil mewawancarai salah satu dari mereka karena mereka tidak bersedia.

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pada umumnya masyarakat merasakan dampak sosial ke arah positif atas dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Dampak tersebut dinilai tidak terlalu signifikan, mengingat tidak semua masyarakat merasakan dampak tersebut. Terlebih masyarakat umum yang tidak memiliki stand untuk berjualan di area fasilitas tersebut. Meski begitu, keberadaan fasilitas pariwisata dinilai dapat menjadi potensi yang bagus di masa depan seiring dengan terus berkembangnya pariwisata di Kota Batu. *Statement* yang mendukung pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Sujoko, Manajer *Rest Area* Karangploso yang juga sekaligus Kepala Desa Donowarih Kecamatan Karangploso.

“Rest Area ini dibangun diatas tanah desa, dan kebetulan tanah tersebut berada di jalur alternanif. Namun terkait itu, ini sudah ditetapkan di tahun 2017 bahwa akan dibangun jalan alternative baru dari Purwodadi menuju Batu dan salah satu “kepala” dari jalan alternative tersebut ada di pasar Karangploso. Jadi harapan kami nantinya jalan alternative ini dapat menjadi jalan utama. Pelebaran jalan juga telah dilakukan, sehingga jalan ini masih dapat menampung kendaraan lebih banyak.” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa manajerial *Rest Area* Karangploso memiliki pandangan bahwa *Rest Area* ini berpotensi besar di masa depan, mengingat arah pembangunan yang memungkinkan Karangploso menjadi salah satu kawasan penghubung utama Pasuruan dan Kota Batu, sehingga saat ini memang pengembangan dan pemanfaatannya belum terlalu maksimal.

Perubahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Karangploso sebagai dampak dari pengembangan pariwisata di Kota Batu memang dapat dirasakan oleh sebagian orang. Mereka yang merasakan perubahan itu mayoritas merupakan warga yang memiliki stand atau membuka usaha di sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Masyarakat merasa sejak dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, ada sedikit demi sedikit perubahan sosial ke arah positif yang mereka rasakan.

Berbeda dengan masyarakat yang memiliki stand dan berjualan di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso, masyarakat yang berada jauh dari pusat Kecamatan Karangploso dimana merupakan letak dari fasilitas-fasiitas pariwisata Kecamatan Karangploso justru merasakan dampak yang lebih kecil atau bahkan tidak merasakan dampak sosial sama sekali. Masyarakat yang berada jauh dari pusat Kecamatan Karangploso hanya tersentuh modernisasi secara umum dari pelebaran

jalan raya Karangploso-Batu yang telah rampung beberapa bulan lalu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang masih apatis terhadap peluang usaha, serta kondisi fasilitas pariwisata di Karangploso yang masih jauh dari kata maksimal. Mereka juga khawatir akan mengalami kerugian jika berinvestasi di stand-stand yang berada di fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso karena mereka menganggap fasilitas tersebut masih sangat sepi.

Meski dampak sosial yang dialami masyarakat tidak terlalu signifikan, fenomena tersebut tetap dapat dianalisis sesuai dengan teori dampak sosial pariwisata yang disampaikan oleh Cohen. Menurut Cohen (Hirawan-Shandika : 2008) dampak sosial pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam sepuluh kelompok besar, antara lain:

- a) dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi dan ketergantungan;
- b) dampak terhadap hubungan interpersonal antar anggota masyarakat;
- c) dampak terhadap dasar-dasar organisasi kelembagaan sosial;
- d) dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
- e) dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
- f) dampak terhadap pola pembagian kerja;
- g) dampak terhadap statifikasi dan mobilisasi sosial;
- h) dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
- i) dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial;
- j) dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Berdasarkan pada teori tersebut, ada beberapa point perubahan sosial yang dapat peneliti temukan pada masyarakat Kecamatan Karangploso sehubungan dengan pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu. Berikut merupakan dampak sosial yang terjadi sebagai dampak dari pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

a. Perubahan kualitas hidup masyarakat

Perubahan kualitas hidup masyarakat merupakan dampak sosial yang paling terlihat dari masyarakat Karangploso setelah dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Hal tersebut terlihat dari fakta bahwa sebelum fasilitas pariwisata di Karangploso ini dibangun, sebagian dari mereka hanya menganggur dan bertani saja. Namun sejak dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, mereka memiliki kegiatan tambahan yang bermanfaat bukan hanya dari segi ekonomi saja tetapi juga dari segi sosial. Dengan demikian, secara otomatis kualitas hidup mereka juga meningkat.

Selain itu, para pedagang yang sebelumnya tidak memiliki tempat berjualan tetap, sekarang sudah memiliki lapak sendiri yang lebih layak meskipun harus menyewa. Kondisi ini membuat kualitas usaha masyarakat berubah, dari yang sebelumnya hanya berjualan di lapak bambu, sekarang mereka telah memiliki stand sendiri yang lebih bersih, tertata, dan kokoh. Kualitas produk yang mereka tawarkan juga berubah, baik dari segi ekonomis maupun kualitasnya.

b. Meningkatkan peran kepala desa dalam kehidupan sosial masyarakat

Fasilitas pariwisata di Karangploso menjadi salah satu pusat perekonomian baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Donowarih. Selain memang fasilitas pariwisata tersebut berdiri diatas tanah milik desa Donowarih, pengelola fasilitas pariwisata tersebut juga

merangkap sebagai Kepala Desa Donowarih. Hal ini membuat peran dari Kepala Desa Donowarih menjadi bertambah.

Pembagian stand untuk dusun-dusun di Desa Donowarih menjadi program pertama dari pengelola untuk menggerakkan perekonomian di Desa Donowarih. Program ini awalnya mendapat apresiasi bagus dari masyarakat, sebelum akhirnya masyarakat menyerah karena tidak kunjung ramai. Meski begitu, terjadi penambahan peran Kepala Desa yang sebelumnya berperan sebagai pemimpin desa dalam hal pelayanan masyarakat, kini beliau juga bertanggung jawab soal fasilitas pariwisata di Karangploso yang erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat.

c. Terjadinya potensi penyimpangan sosial

Rest Area Karangploso yang termasuk sebagai salah satu fasilitas pariwisata di Karangploso saat ini menjadi tempat berkumpul baru bagi masyarakat sekitar. Masyarakat biasa berkumpul disini untuk menikmati suasana sore dan akhir pekan. Kebanyakan dari mereka mengajak keluarga dan teman-temannya untuk sekedar berjalan-jalan di *Rest Area* Karangploso.

Namun ternyata, bukan hanya sore hari yang dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul di *Rest Area*. Ada sebagian masyarakat yang didominasi oleh anak-anak remaja berkumpul di *Rest Area* diatas jam 11 malam. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang timbul akibat dibangunnya tempat berkumpul baru. Meskipun sampai saat ini tidak ada laporan kriminalitas ataupun kejahatan lainnya, budaya demikian tetap harus diwaspadai agar tidak meluas dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Dampak-dampak sosial tersebut tentu terjadi secara bertahap di beberapa golongan masyarakat. Masyarakat yang terdampak pada umumnya adalah mereka yang berperan aktif dalam kegiatan pariwisata, seperti pedagang dan kepala desa. Selebihnya hanya golongan masyarakat tertentu seperti remaja-remaja yang tertarik untuk melakukan penyimpangan. Namun masyarakat lain yang tidak terlibat masih belum merasakan dampak sosial apapun dari pembangunan fasilitas pariwisata ini.

Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara masyarakat tentang dampak sosial akibat pengembangan pariwisata di Kota Batu adalah saat ini masyarakat secara umum masih merasakan dampak yang tidak signifikan dari pengembangan pariwisata di Kota Batu. Hal ini dikarenakan dampak sosial yang timbul di masyarakat merupakan dampak tidak langsung, dimana dampak sosial yang terjadi di masyarakat lebih disebabkan oleh dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata. Sedangkan untuk dampak sosial langsung dari pengembangan pariwisata di Kota Batu seperti perubahan sosial akibat kedatangan wisatawan masih belum dirasakan.

Tabel 14. Perbandingan kondisi sosial masyarakat Karangploso sebelum dan sesudah berkembangnya pariwisata di Kota Batu.

No.	Kondisi sosial masyarakat sebelum pariwisata di Kota Batu berkembang	Kondisi sosial masyarakat setelah pariwisata di Kota Batu berkembang
1.	Masyarakat Karangploso mayoritas merupakan masyarakat yang seluruh kegiatannya tidak lepas dari sektor pertanian.	Masyarakat Karangploso mengalami peningkatan kualitas hidup dimana kegiatan masyarakat menjadi semakin bermanfaat.
2.	Pedagang tidak memiliki tempat yang tetap dan layak untuk berjualan, sehingga kualitas produk yang mereka	Para pedagang memiliki tempat berjualan yang lebih tetap dan terpusat. Bagi mereka yang memiliki stand, disediakan fasilitas

Lanjutan Tabel 14.

	tawarkan juga relatif rendah.	bangunan tetap yang lebih layak, sehingga kualitas produk mereka juga meningkat.
3.	Peran kepala desa Donowarih hanya sebagai pemimpin dan pengayom dalam pelayanan masyarakat yang bersifat administratif.	Kepala Desa Donowarih merangkap jabatannya sebagai manajer <i>Rest Area</i> Karangploso, sehingga peran beliau dalam masyarakat bertambah sebagai pengembang perekonomian masyarakat.
4.	Penyimpangan remaja di Kecamatan Karangploso cenderung menyebar dan terdiri dari kelompok-kelompok kecil.	Setelah <i>Rest Area</i> dibangun, para remaja memiliki tempat baru untuk melakukan penyimpangan sosial.

Sumber : Olahan peneliti, 2017.

2. Analisis Dampak Ekonomi

Pariwisata sangat erat kaitannya dengan perekonomian. Oleh karena itu, dalam setiap pengembangan dan pembangunan pariwisata selalu memunculkan berbagai dampak ekonomi. Dampak tersebut pada umumnya bukan hanya dirasakan di area destinasi semata, namun juga di kawasan sekitar destinasi tersebut.

Setidaknya demikianlah yang dialami oleh masyarakat Karangploso yang memiliki tempat usaha di sekitar *Rest Area* Karangploso. Pembangunan *Rest Area* Karangploso dan fasilitas-fasilitas lainnya sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan perekonomian mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat cenderung berdampak positif.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, masyarakat Karangploso yang juga membuka usaha persewaan sepeda motor mini untuk anak-anak di kawasan *Rest Area* Karangploso.

“Sejak membuka usaha sewa mainan disini ya pendapatan Alhamdulillah bertambah. Dulu cuma bertani saja, sekarang ditambah persewaan mainan disini tiap sabtu minggu sama hari libur. Kalo ditotal sehari bisa dapat 100-200 ribu mas, dibagi sama tiga teman saya yang ikut bantu.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Suratini, pedagang makanan di pujasera Karangploso.

“Alhamdulillah mas, semenjak dibangun Rest Area Karangploso penghasilan saya bertamabah. Apalagi kalo ada acara seperti gerak jalan, senam masal, makin ramai mas. Kalo hari biasa ramainya malam saja. Penghasilan saya sekitar 500-900 ribu per minggu, nggak tentu mas.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Tidak hanya itu saja, Pak Bisri, penjual makanan ringan di kawasan Pujasera Karangploso ini juga menyampaikan hal yang sama.

“Dengan dibangunnya tempat seperti ini saya senang mas. Banyak orang-orang berkumpul, jadi banyak yang beli. Apalagi pas hari libur atau pas ada gerak jalan. Kalo hari biasa masih sepi. Pendapatan saya sekitar 50 ribu mas, kalo ramai ya bisa 100 ribu. Larisnya pas kalo ada acara gerak jalan atau karnaval.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Pak Sutris, salah satu pengelola taman bermain anak-anak yang berada di sekitar kawasan Rest Area Karangploso juga menyampaikan hal serupa. Meski begitu, beliau juga memberi masukan agar pembangunan Rest Area Karangploso ini cepat dilanjutkan.

“Dulu saya kerja di bangunan mas, terus diajak sama Mas Muin buat ikut disini sampai sekarang. Karena butuh tiga orang saya ajak juga teman-teman saya yang menganggur. Pendapatan nggak tentu mas, ramainya cuma sabtu minggu sama hari libur saja. Kalo bisa ya pembangunan disini dipercepat agar bisa menarik orang-orang lebih banyak. Kalo ramai kan pedagang-pedagang disini juga senang mas.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Apa yang disampaikan pak Sutris memang cukup beralasan. Pasaunya fasilitas-fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso khususnya *Rest Area* Karangploso dinilai belum begitu menarik bagi pengunjung. *Rest Area* Karangploso belum memiliki daya tarik yang kuat bagi pengunjung, khususnya wisatawan Kota Batu. Demikianlah yang disampaikan oleh Pak Zainur, pengunjung asal Pasuruan yang menyempatkan diri berkunjung sejenak di *Rest Area* Karangploso. Beliau berencana melakukan perjalanan ke Kota Batu untuk berwisata bersama keluarganya.

Beliau pun sempat menyampaikan pandangannya soal *Rest Area* Karangploso kepada peneliti.

“Sebenarnya bagus mas, cuman sepertinya belum selesai dibangun ya. Kalo memang dibangun agar menarik wisatawan seharusnya ada atraksi disini. Mungkin pertunjukan atau apa gitu yang bisa menarik wisatawan. Kalau cuma dibiarkan seperti ini kalo menurut saya nggak akan maksimal.”(Wawancara, 9 November 2016)

*“Harapan saya ya mohon dilengkapi fasilitasnya, terus stand-stand yang belum terisi supaya diisi. Kan ini tujuannya supaya jadi pusat oleh-oleh ya. Kalau nggak ada yang jual ya nggak bisa disebut pusat oleh-oleh jadinya. Terus sama promosinya mas, saya yakin masih banyak yang nggak tau tentang *Rest Area* ini. Jadi lebih baik promosinya ditingkatkan.”* (Wawancara, 9 November 2016)

Meskipun menurut *visitor* masih banyak yang harus diperbaiki oleh pengelola terhadap fasilitas-fasilitas pariwisata tersebut, pihak Pemerintah Desa Donowarih merasa bahwa dampak ekonomi bagi masyarakat sudah cukup dirasakan. Setidaknya demikianlah yang disampaikan oleh Kepala Desa Donowarih Kabupaten Malang, Bapak Sujoko. Beliau juga merangkap sebagai manajer *Rest Area* Karangploso.

“Banyak sekali manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Intinya dari UKM-UKM kecil bisa berjualan disana. Dan warga masyarakat yang dulunya menganggur bisa mendapatkan pekerjaan. Warga bisa mendapatkan Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- setiap malam dengan cara menyewakan berbagai permainan seperti bianglala, motor-motoran, dan lain sebagainya,

kemudian ibu-ibu bisa menjual gorengan dan lain sebagainya, belum lagi warga yang menjaga parkir. Dari situ sudah diketahui bahwa manfaat dari dibangunnya Rest Area ini sangat besar sekali.” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa memang terjadi perubahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Karangploso sebagai dampak dari pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata di Kecamatan Karangploso. Dampak tersebut cenderung mengarah pada perubahan positif di sektor perekonomian. Terdapatnya pusat berkumpul baru bagi masyarakat maupun pengunjung membuat pedagang memiliki tempat berjualan baru. Selain itu masyarakat yang memiliki kreatifitas tinggi dapat mengambil peluang dari dibangunnya fasilitas-fasilitas ini, seperti membuka penyewaan mainan motor untuk anak-anak seperti yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi.

Menurut hasil olahan data pendukung tentang dampak ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha, para pelaku usaha sepakat bahwa mereka mengalami peningkatan kualitas hidup setelah membuka usaha di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Begitu pula dengan peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh pelaku usaha, mereka setuju bahwa pendapatan mereka bertambah setelah membuka usaha di tempat tersebut. Tidak hanya itu, para pelaku usaha juga merasakan manfaat berupa berkurangnya pengangguran di daerah mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa sebagian dari pelaku usaha disana sebelumnya merupakan pengangguran. Dampak positif lain adalah semakin mudahnya para pelaku usaha untuk menawarkan dagangannya, karena

terdapat tempat berkumpul baru bagi masyarakat. Berikut merupakan hasil dari olahan data pendukung.

Tabel 15. Mean data pendukung untuk dampak ekonomi para pelaku usaha.

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya mengakui bahwa pedagang/pelaku usaha di Rest Area Karangploso mengalami peningkatan pendapatan setelah membuka usaha di Rest Area Karangploso.	74	4.11	Setuju
2.	Saya mengakui bahwa tingkat pengangguran masyarakat Karangploso menurun setelah dibangunnya Rest Area di Kecamatan Karangploso.	70	3.88	Setuju
3.	Saya mengakui bahwa para pedagang semakin mudah untuk menawarkan barang dagangannya setelah Rest Area Karangploso dibangun.	72	4.00	Setuju
4.	Saya merasa dampak positif dari dibangunnya Rest area di Karangploso masih belum merata.	58	3.22	Tidak tahu
5.	Masyarakat yang tidak berdagang/memiliki usaha di Rest Area Karangploso dan sekitarnya tidak mengalami perubahan sosial ekonomi apapun setelah dibangunnya Rest Area Karangploso.	56	3.11	Tidak tahu
6.	Saya merasa optimis dengan potensi pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso di masa yang akan datang.	78	4.33	Sangat Setuju

(Sumber : Olahan peneliti)

Terkait pemerataan manfaat sosial ekonomi dari fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, terdapat perbedaan pandangan dari para pelaku usaha. Hasil dari kuisioner menunjukkan bahwa basyarakat tidak tahu menahu tentang sejauh apa dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak memiliki tempat usaha di sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Optimisme tergambar pada para pelaku usaha dimana mereka sangat meyakini bahwa Kecamatan Karangploso memiliki masa depan yang baik dalam bidang pariwisata.

Ternyata pemerataan dampak sosial ekonomi tersebut juga menjadi isu di kalangan masyarakat. Pembangunan yang masih baru, belum terlalu ramainya fasilitas tersebut, serta masyarakat yang masih sedikit apatis terhadap peluang usaha menjadi sebab mengapa dampak dari pembangunan pariwisata di Kota Batu, khususnya pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso,



hanya dinikmati oleh segelintir orang. Masyarakat yang berada jauh dari *Rest Area*

Karangploso merasa belum mendapat dampak apapun dari pembangunan pariwisata di Kota Batu dan pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Demikianlah yang disampaikan pak Jefri, warga Dusun Karangn Desa Donowarih Kecamatan Karangploso.

“Belum kepikiran untuk membuka usaha apapun mas. Soalnya masyarakat disini masih belum merasakan manfaat Rest Area. Orang-orang yang jualan disana saja yang sudah merasakan. Kalo di Karangn sini nggak terasa. Mungkin kalau sudah cukup ramai, fasilitasnya sudah dilengkapi, mungkin saya juga akan buka usaha mas daripada nganggur.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Selain itu, masyarakat juga masih ragu terhadap potensi usahanya jika dibangun dalam waktu dekat. Mereka merasa saat ini masih terlalu beresiko untuk membuka usaha sendiri maupun menyewa salah satu stand di *Rest Area*. Hal ini disampaikan oleh ibu Ani, salah satu warga desa Donowarih Kecamatan Karangploso.

“Suami saya dulu sempat ditawari sewa stand di Rest Area, tapi ditolak katanya masih sepi, takut rugi. Kalo masnya lihat sendiri pas hari biasa kan sepi. Cuma warung-warung di belakang yang ada pembelinya. Kalo yang samping samping itu sepi, malah banyak yang tutup.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Peneliti memang tak bisa menyangsikan pernyataan tersebut. Pasalnya setiap kali peneliti melakukan observasi di *Rest Area*, stand-stand yang ada di *Rest Area* Karangploso terutama yang berada di sisi timur memang kebanyakan masih tutup.

Tabel 16. Mean data pendukung untuk dampak ekonomi para masyarakat yang tidak memiliki usaha di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso.

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya mengakui bahwa pedagang/pelaku usaha di Rest Area Karangploso mengalami peningkatan pendapatan setelah membuka usaha di Rest Area Karangploso.	110	3.66	Setuju
2.	Saya mengakui bahwa tingkat pengangguran masyarakat Karangploso menurun setelah dibangunnya Rest Area di Kecamatan Karangploso.	120	4	Setuju
3.	Saya mengakui bahwa para pedagang semakin mudah untuk menawarkan barang dagangannya setelah Rest Area Karangploso dibangun.	125	4.16	Setuju
4.	Saya merasa dampak positif dari dibangunnya Rest area di Karangploso masih belum merata.	139	4.63	Sangat Setuju
5.	Masyarakat yang tidak berdagang/memiliki usaha di Rest Area Karangploso dan sekitarnya tidak mengalami perubahan sosial ekonomi apapun setelah dibangunnya Rest Area Karangploso.	120	4	Sangat Setuju
6.	Saya merasa optimis dengan potensi pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso di masa yang akan datang.	122	4.06	Setuju

(Sumber : Olahan peneliti)

Hasil olahan data pendukung diatas sesuai dengan item peneliti tentang ketidakmerataan manfaat, masyarakat menjawab sangat setuju. Hal ini didapat dari masyarakat yang memiliki rumah yang jauh dari jalan raya Karangploso-Batu maupun masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Meski begitu, optimisme tetap tergambar pada masyarakat. Mereka meyakini potensi pariwisata di Kecamatan Karangploso dapat mengembangkan potensinya dalam bidang pariwisata agar dapat masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari dibangunnya fasilitas pariwisata Karangploso dengan lebih maksimal.

Pendapat lain tentang dampak ekonomi masyarakat juga disampaikan oleh Pak Subagyo. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Pak Subagyo lebih peka

terhadap perubahan yang terjadi sehubungan dengan pengembangan pariwisata di kota Batu.

”Dampak ekonomi ya mungkin karena jalannya sudah diperlebar, jadi jalannya sudah lebih ramai mas. Terus kebetulan ada modal, saya buka usaha warung lalapan di depan rumah ini. Kalo rumah di pinggir jalan ini kan keuntungannya banyak mas. Ya penghasilan buat tambahan hidup alhamdulillah cukup.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi yang dirasakan masyarakat Karangploso sebagai imbas dari dibangunnya pariwisata di Kota Batu sangat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Salah satunya yaitu *Rest Area* Karangploso. Pembangunan *Rest Area* Karangploso memang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Donowarih. Seperi yang disampaikan oleh Bapak Sujoko, manajer *Rest Area* Karangploso yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Donowarih.

”Rest Area Karangploso merupakan tanah bengkak (kas) desa Donowarih. Memang sengaja kita desain untuk meningkatkan perekonomian warga desa Donowarih dan terkait pengelolaan lapak-lapaknya kita serahkan ke RW-RW di desa Donowarih., termasuk lembaga-lembaga desa seperti Karang Taruna. Harapannya nanti Rest Area ini bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh warga desa Donowarih” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Memang saat ini pengelolaan serta pembangunan *Rest Area* Karangploso masih belum terlalu maksimal. Hal ini diakui oleh masyarakat maupun *visitor* sebagai salah satu stakeholder dari pembangunan fasilitas pariwisata ini. Meski begitu, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak dapat dinafikan. Dampak ekonomi tersebut meliputi semakin meningkatnya pendapatan masyarakat yang

berfjualan di sekitar fasilitas tersebut, terciptanya lapangan pekerjaan baru, serta mendorong masyarakat berwirausaha.

Seperti halnya dampak sosial, perubahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Karangploso sebagai dampak dari perkembangan pariwisata di Kota Batu merupakan dampak tidak langsung. Masyarakat Karangploso lebih merasakan dampak ekonomi setelah pemerintah membangun berbagai fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Sedangkan untuk dampak langsung yang disebabkan oleh datangnya wisatawan ke kecamatan Karangploso masih sangat kecil.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dimana masyarakat lebih banyak menyebut kondisi ekonomi mereka berubah setelah dibangunnya fasilitas pariwisata di Karangploso, bukan setelah Kota Batu mengembangkan pariwisatanya. Terlebih lagi saat peneliti mengajukan pertanyaan tentang pengaruh antara pengembangan pariwisata Batu dengan usaha mereka, mereka menyebut bahwa pengaruhnya sangat kecil dan bahkan tidak ada sama sekali. Mereka menyebut bahwa wisatawan Kota Batu kebanyakan hanya melewati Karangploso tanpa mampir terlebih dahulu.

Meskipun mayoritas konsemen dari pelaku usaha yang berada di sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso merupakan masyarakat lokal sendiri, bukan berarti tidak ada sama sekali dampak ekonomi yang dirasyaratkan sebagai dampak dari pengembangan pariwisata di Kota Batu. Bahkan sesuai dengan hasil wawancara peneliti, banyak masyarakat yang mengalami perubahan positif dalam bidang ekonomi. Cohen (Hirawan 2008) menyebutkan dampak pariwisata terhadap perekonomian dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, antara lain :

- a) Dampak terhadap penerimaan devisa;
- b) Dampak terhadap pendapatan masyarakat;
- c) Dampak terhadap kesempatan kerja;
- d) Dampak terhadap harga-harga;
- e) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan;
- f) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol;
- g) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya; dan
- h) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Dari teori diatas, dapat diambil beberapa point yang sesuai dengan fenomena yang dialami oleh masyarakat Karangploso. Berikut merupakan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata di Kota Batu terhadap masyarakat Karangploso.

- a) Meningkatnya pendapatan masyarakat yang membuka usaha di sekitar fasilitas pariwisata

Pembangunan fasilitas pariwisata seperti *Rest Area* Karangploso dan lain sebagainya tentu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana hampir semua masyarakat sebagai narasumber yang memiliki usaha di sekitar fasilitas pariwisata tersebut mengaku mengalami perbaikan kondisi ekonomi dibandingkan sebelum fasilitas pariwisata tersebut dibangun. Masyarakat yang sebelumnya hanya bergantung pada pertanian dan usaha lain yang tidak berhubungan dengan pariwisata, saat ini mulai merambah pada dunia pariwisata melalui fasilitas-fasilitas tersebut.

Oleh karena itu, dengan bertambahnya pekerjaan dan kegiatan perekonomian masyarakat, otomatis pendapatan sebagian masyarakat juga mulai meningkat. Masyarakat yang sebelumnya hanya mendapat penghasilan dari bertani, kini juga mendapat penghasilan dari berjualan, membukan taman

bermain serta menyewakan mainan anak-anak di sekitar fasilitas tersebut.

Peningkatan pendapatan ini juga dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sudah dibahas sebelumnya.

Namun sayangnya, peningkatan pendapatan masyarakat tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Karangploso. Sebagian besar masyarakat merasa belum perlu untuk berpartisipasi dan membuka usaha untuk memanfaatkan dampak dari pengembangan pariwisata di Kota Batu, sehingga mereka tidak merasakan perubahan tingkat pendapatan. Kondisi ini membuat masyarakat terkesan apatis terhadap dibangunnya fasilitas pariwisata di Karangploso.

b) Terciptanya kesempatan kerja

Pembangunan sebuah pusat perekonomian yang berbasis masyarakat baik yang berskala besar maupun kecil tentunya sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya perubahan pada tingkat pendapatan, namun juga perubahan pada tingkat kesempatan kerja. Dengan pengelolaan yang tepat serta kreativitas masyarakat, pusat perekonomian dapat menunjang perekonomian warga khususnya untuk mengurangi pengangguran.

Begitupun dengan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso yang terpusat pada *Rest Area* Karangploso. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, terdapat perubahan dalam sisi kesempatan kerja dibanding sebelumnya. Beberapa masyarakat mengaku menganggur sebelum dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso ini. Namun

setelah fasilitas pariwisata tersebut dibangun, masyarakat merasa ada perubahan dalam hal kesempatan kerja.

Meskipun memang tidak semua masyarakat Karangploso merasakannya, namun fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kota Batu menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian, yang salah satunya berupa peningkatan kesempatan kerja.

Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya, mengingat pengembangan pariwisata di Kota Batu terus dilakukan. Masyarakatpun bisa memanfaatkan pembangunan fasilitas pariwisata oleh pemerintah sebagai lahan bagi mereka untuk berkontribusi bagi pariwisata sekaligus menekan angka pengangguran.

c) Mendorong aktivitas wirausaha

Rest Area Karangploso memiliki berbagai stand yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan. Selain itu, masyarakat juga dapat menyewa tempat di sekitar *Rest Area* untuk membuka lapak *non-stand* yang biaya sewanya lebih murah. Tentunya hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berjualan dan merintis wirausahanya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil manfaat secara efektif dari pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Selain membuka usaha di sekitar kawasan fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso, masyarakat juga dapat mengambil kesempatan untuk membuka usaha di pingiran jalan raya Batu-Karangploso. Hal ini dimungkinkan karena jalan raya Batu-Karangploso telah diperlebar dan

dierbaiki, sehingga saat ini jalan raya Batu-Karangploso menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Usaha ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pinggir jalan raya, seperti salah satu narasumber peneliti Bapak Subagyo.

Meskipun pembangunan tersebut cukup mendorong masyarakat untuk berwirausaha, nyatanya sampai saat ini masih belum ada penyuluhan dan pelatihan resmi tentang usaha pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengelola. Hal ini membuat sebagian masyarakat masih belum mengerti usaha apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan potensi dari fasilitas pariwisata ini bagi perekonomian mereka. Terlebih untuk masyarakat yang jauh dari pusat fasilitas pariwisata di Karangploso maupun masyarakat yang berada jauh dari jalan raya Batu-Karangploso.

Kesimpulan dari analisis diatas, bahwa dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata di Kota Batu memang terjadi secara tidak langsung, dimana masyarakat Karangploso lebih terdampak secara ekonomi dari pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso daripada pengembangan pariwisata di Kota Batu. Hal ini membuat perubahan ekonomi masyarakat Karangploso sebagai dampak dari pengembangan pariwisata di Kota Batu juga tidak terlalu signifikan. Meski begitu, peneliti dapat menemukan perubahan ekonomi masyarakat Karangploso dan mengidentifikasinya sebagai dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata di Kota Batu sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Cohen.

Tabel 17. Perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Karangploso sebelum dan sesudah berkembangnya pariwisata di Kota Batu.

No.	Kondisi ekonomi masyarakat sebelum pariwisata di Kota Batu berkembang	Kondisi ekonomi masyarakat setelah pariwisata di Kota Batu berkembang
1.	Pendapatan masyarakat hanya bergantung kepada sektor non pariwisata (mayoritas pertanian)	Pendapatan masyarakat meningkat karena masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pariwisata di Karangploso untuk menambah pendapatan
2.	Kesempatan kerja terbatas pada sektor pertanian, buruh, dan perdagangan tradisional	Kesempatan kerja bertambah di sektor pariwisata, seperti usaha cinderamata dan hiburan
3.	Belum ada tempat yang layak untuk merintis usaha baru	Masyarakat Karangploso telah memiliki <i>Rest Area</i> Karangploso sebagai lahan yang bagus untuk merintis usahanya
4.	Masyarakat masih apatis terhadap potensi yang dimilikinya dan daerahnya	Masyarakat mulai sadar tentang potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan <i>Rest Area</i> Karangploso

Sumber : Olahan peneliti. 2017.

B. Kondisi *Community Based Tourism* (CBT) di Kecamatan Karangploso

Kabupaten Malang

Menurut Menurut Suansri (2003 :12) prinsip dasar CBT antara lain

- a. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat,
- b. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek,
- c. Mempromosikan kebanggaan masyarakat,
- d. Meningkatkan kualitas hidup,
- e. Menjamin sustanbilitas lingkungan,
- f. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik,



- g. Membantu mengembangkan cross-cultural learning,
- h. Menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia,
- i. Mendistribusikan keuntungan secara adil diantara anggota masyarakat,
- j. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat.

Berdasar pada teori tersebut, peneliti menganalisis hasil wawancara dengan pemerintah, masyarakat, pengelola, serta *visitor* tentang kondisi CBT di Kecamatan Karangploso. Analisis tersebut mencakup tentang tingkat partisipasi masyarakat, upaya pemerintah dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat, serta persepsi *visitor* tentang pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.

1. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat (CBT) menjadi salah satu trend yang saat ini telah banyak diterapkan di berbagai desa wisata. Hal ini karena CBT memungkinkan masyarakat secara mandiri mengelola kegiatan pariwisata di desa mereka, sehingga kontribusi dan partisipasi masyarakat dapat digali secara maksimal. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kreatifitasnya secara bebas dan terkoordinir demi peningkatan kesejahteraannya.

Penerapan CBT juga tak lepas dari pengamatan pemerintah maupun pengelola fasilitas pariwisata di Karangploso. Sering dengan berkembangnya pariwisata di Kota Batu yang membuat masyarakat Karangploso terdampak secara sosial dan ekonomi, mau tidak mau masyarakat harus mengambil kesempatan ini untuk berpartisipasi secara maksimal. Harapan ini disampaikan oleh Kepala Desa Donowarih, Bapak Sujoko.

“Harapannya nanti Rest Area dan fasitias lainnya ini bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh warga desa Donowarih, serta mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata. Masyarakat Donowarih dan Karangploso umumnya harus mampu memanfaatkan peluang ini, jangan

sampai potensi-potensi yang dimiliki masyarakat terbengkalai. Intinya pembangunan Rest Area ini kan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Bapak Djayusman, SH, MM, selaku KASUBAG Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga menyampaikan hal senada.

“Sebenarnya Rest Area Karangploso ini diposisikan sebagai pusat oleh-oleh, begitupun dengan pasar sayur dan buah yang ada disana. Nantinya diharapkan wisatawan yang dari Batu maupun menuju Batu dapat mampir ke Rest Area untuk beristirahat, berbelanja, dan menikmati atraksi wisata yang ada disana. Tentunya semua kegiatan tersebut berorientasi masyarakat, artinya mulai dari penjual, pengelola, penyaji atraksinya juga, semua dari masyarakat.” (Wawancara, 15 September 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan Rest Area Karangploso dan fasilitas-fasilitas lain memang berbasis masyarakat. Artinya pembangunan fasilitas tersebut murni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mendorong masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi dalam bidang pariwisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sanalah muncul harapan bagi penggagas dan pengelola agar masyarakat turut berperan aktif dalam kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Peneliti pun kemudian melakukan wawancara kepada masyarakat perihal sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat minim. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Bisri, penjual makanan ringan di kawasan Pujasera Karangploso.

“Ya cuma jualan ini mas. Partisipasinya ya ikut menjaga kebersihan saja biar terlihat bersih. Pedagang disini juga selalu menjaga kebersihan. Kalau yang skala besar ya belum ada. Kan ini masih baru, masyarakat sini juga belum ada yang dimintai untuk berpartisipasi. Kan biasanya pemerintah atau

pengelola punya rencana ini, terus masyarakat bagian ini, itu belum ada.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pak Sutris, salah satu pengelola taman bermain anak-anak yang berada di sekitar kawasan *Rest Area* Karangploso. Beliau merasa belum banyak masyarakat yang mengenal pariwisata.

“Belum ada partisipasi kalo masyarakat sini. Yang mau dipartisipasikan nggak ada, palingan jual-jual aja mas. Masyarakat disini masih belum paham harus apa untuk menarik wisatawan. Pemerintah belum banyak memberi pelatihan tentang pariwisata. Harusnya dikasih ya mas, kan katanya ini mau jadi pusat oleh-oleh, jadi masyarakatnya bisa siap-siap.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Ibu Suratin, pedagang di salah satu stand di Pujasera Karangploso juga menyampaikan hal serupa.

“Partisipasi masyarakat ya ikut meramaikan disini. Termasuk jualan ini kan juga ikut berpartisipasi ya mas. Orang-orang kecil bisanya cuma jualan-jualan saja mas. Kalo masyarakat lain masih belum ada sepertinya. Kan ini masih baru mas, jadi belum ada keinginannya.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Masyarakat maupun pedagang menganggap mereka belum terlalu berpartisipasi terhadap kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso karena mereka merasa hal tersebut belum terlalu diperlukan. Mereka berharap agar pembangunan fasilitas pariwisata yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat diselesaikan secepatnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mulyadi, masyarakat Karangploso yang juga membuka usaha persewaan sepeda motor mini untuk anak-anak di kawasan *Rest Area* Karangploso. Beliau bahkan menyarankan pemerintah maupun pengelola untuk membangun kolam renang untuk anak-anak di *Rest Area* Karangploso agar makin ramai.

“Partisipasinya belum ada mas, apa yang mau diparticipasikan? Disini masih belum ramai, jadi kami cuma mengambil peluang usaha seadanya. Mungkin kalau boleh saran mas, yang dibelakan itu bisa dibikin kolam renang anak-anak biar makin ramai nantinya. Kalo seperti itu kan kita bisa berpartisipasi lebih besar. Kalau saat ini ya belum ada partisipasinya buat pariwisata.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa belum ada dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi maksimal terhadap pariwisata. Masyarakat menilai bahwa partisipasi tersebut belum terlalu diperlukan karena memang fasilitas pariwisata di Karangploso ini relatif sepi. Masyarakat juga berharap, pembangunan yang belum selesai agar segera diselesaikan. Selain itu, penambahan atraksi wisata juga diharapkan agar segera dibangun untuk menarik pengunjung dan wisatawan agar datang ke Kecamatan Karangploso.

Menurut hasil olahan data pendukung, seluruh elemen yang berkepentingan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan *Community Based Tourism* yakni pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat, sama-sama memberi tanggapan ragu-ragu atau tidak tahu terhadap pernyataan yang diberikan peneliti tentang partisipasi masyarakat.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata di Kecamatan Karangploso, terjadi perbedaan pendapat dari para pelaku usaha dalam hal sejauh apa partisipasi masyarakat terhadap pariwisata. Sebagian pelaku usaha menilai bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup banyak dengan adanya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Partisipasi yang mereka maksud adalah berdagang. Berbeda dengan sebagian pelaku usaha yang lain yang menganggap bahwa partisipasi mereka kurang, terlebih partisipasi yang melibatkan

nilai-nilai pariwisata secara lebih luas. Hal tersebut tergambar dalam hasil olahan data pendukung di bawah ini.

Tabel 18. Mean data pendukung tentang partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pelaku Usaha)

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya mengakui bahwa partisipasi masyarakat Karangploso dalam kegiatan pariwisata masih kurang.	56	3.11	Tidak Tahu
2.	Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pariwisata di Kecamatan Karangploso hanya sebatas berdagang di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso	54	3.00	Tidak Tahu
3.	Saya mengakui bahwa mayoritas masyarakat Karangploso masih dalam tahap partisipasi pasif di bidang pariwisata.	44	2.44	Tidak setuju

(sumber : olahan peneliti)

Begitu pun halnya dengan masyarakat yang tidak memiliki usaha di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Walaupun dalam segi dampak sosial ekonomi masyarakat terjadi perubahan dan perbaikan, namun mereka mengaku belum terlalu dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata oleh pemerintah maupun pengelola fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Hal ini tergambar dari respon masyarakat berupa keragu-raguan mengenai sejauh apa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso. Hal tersebut tergambar dalam data olahan peneliti di bawah ini.

Tabel 19. Mean data pendukung tentang partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Masyarakat)

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya mengakui bahwa partisipasi masyarakat Karangploso dalam kegiatan pariwisata masih kurang.	80	2.66	Tidak Tahu
2.	Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pariwisata di Kecamatan Karangploso hanya sebatas berdagang di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso	99	3.30	Tidak tahu
3.	Saya mengakui bahwa mayoritas masyarakat Karangploso masih dalam tahap partisipasi pasif di bidang pariwisata.	88	2.93	Tidak Tahu

(sumber : olahan peneliti)



Terkait pandangan pemerintah tentang partisipasi masyarakat, hasil olahan data pendukung menggambarkan bahwa pemerintah lokal seperti pemerintah desa Donowarih dan Kecamatan Karangploso menganggap bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik, namun hal berbeda ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten bahwa mereka tidak mengetahui terkait sejauh apa partisipasi masyarakat Karangploso terhadap kegiatan pariwisata. Hasilnya, perbedaan pandangan tersebut berpengaruh pada hasil olahan penelitian data pendukung yang menggambarkan bahwa pemerintah ragu-ragu terkait sejauh apa partisipasi masyarakat Karangploso, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 20. Mean data pendukung tentang partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pemerintah)

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya mengakui bahwa partisipasi masyarakat Karangploso dalam kegiatan pariwisata masih kurang.	63	3.15	Tidak Tahu
2.	Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pariwisata di Kecamatan Karangploso hanya sebatas berdagang di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso	57	2.85	Tidak tahu
3.	Saya mengakui bahwa mayoritas masyarakat Karangploso masih dalam tahap partisipasi pasif di bidang pariwisata.	59	2.95	Tidak Tahu

(sumber : olahan peneliti)

Peneliti juga memiliki pandangan tentang wawasan pariwisata masyarakat, dimana kebanyakan masyarakat sebagai narasumber tidak mengetahui apa itu CBT/*Community Based Tourism*/Pariwisata berbasis masyarakat, sehingga peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu CBT. Hal ini menunjukkan bahwa wawasan masyarakat terhadap pariwisata masih kurang. Terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat yang belum terlalu tinggi, wawasan pariwisata masyarakat

memang selayaknya ditingkatkan sebagai bekal bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih besar bagi pariwisata di masa yang akan datang.

Menurut Suwanto (2004 : 85) partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) partisipasi aktif : partisipasi yang dilakukan secara langsung baik secara perorangan maupun bersama-sama yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan reaksi mau melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan dan pembinaan rasa memiliki dari masyarakat
- b) partisipasi pasif : timbulnya kesadaran untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan wisata, baik terhadap wisatawan maupun atraksi wisata itu sendiri. Dalam peran serta pasif ini masyarakat cenderung hanya sekedar ikut mendukung terpeliharanya kelangsungan kegiatan wisata. Upaya peningkatan peran serta pasif dapat melalui penyuluhan maupun dialog oleh aparatur pemerintah maupun swasta, penyebaran informasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat sekitar kawasan wisata seperti pembangunan jasa penginapan/home stay, penyediaan warung makan, toko cinderamata, jasa pemandu atau penunjuk arah, fotografi, dan menjadi pegawai-pegawai usaha pariwisata.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, partisipasi aktif dan pasif masyarakat dapat ditemukan pada masyarakat Karangploso. Sebagian masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perekonomian dengan menjual berbagai produk yang ditawarkan kepada wisatawan. Meskipun dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlalu signifikan, masyarakat tetap memiliki peran aktif bagi kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Partisipasi aktif banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki stand di sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Masyarakat ikut membuka berbagai usaha seperti berdagang makanan, membuka taman bermain, ataupun menyewakan mainan untuk anak-anak. Partisipasi berupa usaha tersebut cukup menghidupkan kegiatan perekonomian sebagai bagian dari partisipasi aktif

masyarakat lokal. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi bagi pengembangan fasilitas pariwisata di Karangploso.

Partisipasi pasif masyarakat dapat ditemukan di sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki stand ataupun berjualan di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Masyarakat tersebut umumnya merupakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Kecamatan Karangploso. Mereka tidak menolak terhadap pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso, namun mereka juga tidak banyak berpartisipasi terhadap pengembangan tersebut. Mereka merasa partisipasi masyarakat seperti mereka belum terlalu diperlukan karena fasilitas pariwisata di Karangploso masih belum ramai dikunjungi wisatawan.

Kurang aktifnya masyarakat Karangploso dalam menyikapi pengembangan pariwisata di Kota Batu menjadi permasalahan tersendiri. Pembangunan fasilitas yang masih macet serta tidak adanya atraksi wisata yang layak menjadi alasan mengapa masyarakat memilih untuk bersikap apatis. Mereka berharap agar pembangunan segera diselesaikan, sekaligus meminta pemerintah untuk menambah beberapa atraksi wisata sagar fasilitas pariwisata di Karangploso dapat menarik wisatawan lebih banyak.

Partisipasi masyarakat memang belum terlalu mendesak bagi Kecamatan Karangploso, dimana pembangunan pariwisata di kecamatan ini masih belum rampung sepenuhnya. Namun, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi haruslah ditanamkan sejak jauh-jauh hari. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan pariwisata yang sesuai bagi masyarakat

Karangploso. Jika hal tersebut dilakukan, masyarakat dapat menghadapi perubahan sosial ekonomi yang lebih besar dengan lebih siap di masa yang akan datang.

2. Analisis Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pariwisata

Kecamatan Karangploso sebagai salah satu daerah perencanaan pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang pariwisata, tentu sangat membutuhkan partisipasi masyarakat lokal. Terlebih saat ini pembangunan pariwisata di Kota Batu semakin berkembang pesat. Hal ini menimbulkan potensi perubahan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Karangploso yang notabene merupakan salah satu jalur utama untuk masuk ke Kota Batu.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta Pemerintah Desa Donowarih selaku pengelola memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sujoko, Kepala Desa Donowarih Kecamatan Karangploso. Beliau menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga diperlukan peningkatan wawasan pariwisata.

“Terkait pengelolaan lapak-lapaknya kita serahkan ke RW-RW di desa Donowarih., termasuk lembaga-lembaga desa seperti Karang Taruna. Harapannya nanti Rest Area ini bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh warga desa Donowarih. Dari situ kita sebagai pengelola sekaligus pemerintah yang mengayomi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap meningkatkan gairah masyarakat untuk berwirausaha. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan.” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Beliau juga menambahkan, pemerintah desa telah merencanakan berbagai program guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan fasilitas pariwisata tersebut.

“Kami telah memiliki program jangka panjang maupun jangka pendek, program tersebut antara lain mengadakan sosialisasi tentang Rest Area ini kepada masyarakat, salah satunya membagi stand secara adil di tiap-tiap dusun dan RT/RW. Tentunya kami membutuhkan bimbingan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk melakukan hal tersebut. Namun sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Malang.” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyiapkan upaya-upaya apa saja yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata. Selain itu, pemerintah desa yang dalam hal ini bertindak sebagai pengelola fasilitas pariwisata mengharap bantuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk memberikan bimbingan terkait wawasan pariwisata kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih besar guna meningkatkan pengembangan pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada Bapak Djayusman, SH, MM, selaku KASUBAG Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang di tempat dan waktu yang berbeda. Beliau kemudian menjelaskan tentang peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan *Rest Area* Karangploso.

“Rest Area Karangploso awalnya dibangun berdasarkan rekomendasi langsung dari bapak Bupati Malang yang kemudian dibahas bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebetulan terdapat tanah kas desa di desa Donowarih, sehingga Dinas Pariwisata membuat kerja sama dengan Desa

Donowarih untuk membangun Rest Area tersebut. Awalnya, pihak Dinas berencana mengelola Rest Area tersebut dengan konsep pariwisata layaknya beberapa desa wisata lain yang ada di Kabupaten Malang, seperti atraksi wisata setiap dua minggu sekali, promosi yang gencar, dan lain sebagainya. Namun secara mendadak, pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat Karangploso menginginkan pengelolaan penuh dipegang oleh kecamatan dan desa. Sempat ada perdebatan alot antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pemerintah Kecamatan Karangploso. Namun akhirnya Dinas menang, dan melepas pengelolaan ke kecamatan Karangploso.” (Wawancara, 15 September 2016)

Pernyataan tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Kepala Desa Donowarih sebelumnya. Sebelumnya Kepala Desa Donowarih selaku pengelola Rest Area Karangploso mengatakan bahwa pihak Dinas tidak memberikan perhatian yang seharusnya. Padahal menurut Dinas Pariwisata sendiri pihak dinas telah mengajukan tawaran kerja sama namun ditolak oleh pemerintah lokal. Permasalahn ini akan dibahas di point ke tiga tentang Permasalahan yang Ditemukan Peneliti sebagai Hasil Observasi.

Dari sisi masyarakat, upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih di bidang pariwisata dinilai kurang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Zahroh, salah satu anggota PKK desa Donowarih yang juga sempat mengelola stand di Rest Area Karangploso.

“Sampai saat ini belum ada penyuluhan atau pelatihan tentang pariwisata. Yang saya tahu cuma waktu awal dulu saat pembagian stand, warga dikumpulkan di balai desa. Selain itu belum ada lagi kegiatan penyuluhan warga terkait Rest Area atau pariwisata.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Hal yang sama disampaikan oleh pemilik stand di pujasera Karangploso, Bu Suratin.

“Seingat saya belum ada mas. Warga disini secara swadaya menyewa dari pengelola. Ya dulu ada waktu awal pembangunan, sekarang sudah nggak pernah. Belum waktunya mungkin ya mas.” (Wawancara, 8 Oktober 2016)

Akan tetapi, saat ditanya tentang pentingnya penyuluhan pariwisata, beliau mengatakan bahwa hal tersebut masih belum dibutuhkan.

“Belum terlalu penting mas. Lha wong Rest Areanya masih sepi kok. Tunggu rame dulu, tunggu selesai dulu bangunannya. Kan gitu. Nanti pas udah rame malah lupa orang-orang.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Desa Donowarih masih belum berjalan dengan baik setidaknya untuk saat ini. Hal ini kemungkinan dikarenakan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk dilakukan sosialisasi. Masyarakat juga dikhawatirkan bersikap apatis terhadap penyuluhan pariwisata ini karena dampak sosial ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh pariwisata masih belum terlalu dirasakan.

Sementara itu, hasil olahan data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang hampir sama. Seperti hasil pengolahan data pendukung dari para pelaku usaha yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 21. Mean data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pelaku Usaha)

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya merasa bahwa pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa) belum melakukan bimbingan dan pelatihan tentang pariwisata kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata.	61	3.38	Tidak Tahu
2.	Saya mengetahui bahwa pemerintah dan pengelola Rest Area telah merencanakan berbagai program untuk mengembangkan Rest Area Karangploso.	66	3.66	Setuju
3.	Masyarakat tidak keberatan dengan dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.	73	4.05	Setuju
4.	Masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi lebih dalam kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso.	74	4.11	Setuju
5.	Saya merasa bahwa pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di	49	2.72	Tidak Tahu

Lanjutan Tabel 21.

6.	Kecamatan Karangploso masih belum diperlukan.			
7.	Dengan langkah yang tepat, masyarakat Karangploso dapat menjadi masyarakat sadar wisata yang baik di masa depan.	88	4.88	Sangat Setuju
8.	Saya mendukung penuh Kecamatan Karangploso sebagai salah satu prospek pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang.	89	4.94	Sangat Setuju

(sumber : Olahan peneliti)

Hasil tersebut menggambarkan bahwa pelaku usaha di fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso mengetahui bahwa pemerintah dan pengelola memiliki rencana dan program untuk mengembangkan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Dukungan pelaku usaha juga tercermin dari penyetujuan pernyataan peneliti tentang kesediaan masyarakat untuk mendukung dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Selain itu para pelaku usaha juga bersedia berpartisipasi lebih banyak dalam bidang pariwisata karena mereka mengakui bahwa potensi pariwisata juga cukup menjanjikan. Meski begitu, para pelaku usaha belum yakin apakah pembentukan POKDARWIS diperlukan atau tidak. Optimisme yang tinggi lagi-lagi ditunjukkan oleh para pelaku usaha dengan menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat Karangploso mampu menjadi masyarakat sadar wisata yang baik di masa depan.

Beralih ke sisi masyarakat yang tidak memiliki usaha di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso, terdapat sedikit perbedaan pandangan yang peneliti ambil menurut hasil olahan data pendukung. Hasil dari olahan data tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 22. Mean data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Masyarakat)

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya merasa bahwa pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa) belum melakukan bimbingan dan pelatihan tentang pariwisata kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata.	122	4.06	Setuju
2.	Saya mengetahui bahwa pemerintah dan pengelola Rest Area telah merencanakan berbagai program untuk mengembangkan Rest Area Karangploso.	100	3.33	Tidak tahu
3.	Masyarakat tidak keberatan dengan dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.	124	4.13	Setuju
4.	Masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi lebih dalam kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso.	122	4.06	Setuju
5.	Saya merasa bahwa pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di Kecamatan Karangploso masih belum diperlukan.	120	4.00	Setuju
6.	Dengan langkah yang tepat, masyarakat Karangploso dapat menjadi masyarakat sadar wisata yang baik di masa depan.	123	4.10	Setuju
7.	Saya mendukung penuh Kecamatan Karangploso sebagai salah satu prospek pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang.	139	4.63	Sangat Setuju

(sumber : Olahan peneliti)

Hasil tersebut menggambarkan bahwa mayoritas dari mereka masyarakat belum mendapatkan bimbingan terstruktur tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pariwisata. Mereka juga belum mengetahui program pengelola untuk mengembangkan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Hal ini dikarenakan pemerintah setempat hanya mensosialisasikan program-programnya kepada para pelaku usaha.

Meski begitu, dukungan masyarakat juga dapat dikatakan baik karena masyarakat mengaku mendukung penuh peran pemerintah untuk mengembangkan Karangploso sebagai salah satu prospek bidang pariwisata. Mereka juga berkeinginan lebih dalam mengembangkan pariwisata sesuai dengan instruksi dari pemerintah.

Mereka pun meyakini bahwa masyarakat Karangploso mampu menjadi masyarakat pariwisata yang baik di masa yang akan datang.

Sementara itu dari sisi pemerintah, olahan data pendukung menunjukkan hasil yang hampir sama dengan masyarakat. Pemerintah yang merupakan gabungan dari pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten merasa bahwa memang belum ada bimbingan dan pelatihan tentang pariwisata di Kecamatan Karangploso guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sementara itu untuk item yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal program pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, tentu pemerintah sangat mengetahui hal tersebut, khususnya pemerintah desa yang bertindak sebagai pengelola, namun hal tersebut tidak didukung pernyataan dari pemerintah Kabupaten yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu program apa yang direncanakan oleh pemerintah desa sehingga jawaban tersebut berpengaruh pada hasil *mean* dari item tersebut.

Terkait potensi pengembangan, pemerintah sepakat bahwa masyarakat Karangploso mampu bersaing di bidang pariwisata jika dibimbing dengan tepat. Meski begitu, pemerintah menganggap pembentukan POKDARWIS masih belum dibutuhkan. Dukungan penuh juga diberikan oleh pemerintah terhadap pengembangan potensi dan pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Berikut merupakan hasil olahan data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata menurut pandangan pemerintah.

Tabel 23. Mean data pendukung tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata (Pemerintah)

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya merasa bahwa pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa) belum melakukan bimbingan dan pelatihan tentang pariwisata kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata.	63	3.15	Setuju
2.	Saya mengetahui bahwa pemerintah dan pengelola Rest Area telah merencanakan berbagai program untuk mengembangkan Rest Area Karangploso.	71	3.55	Tidak tahu
3.	Masyarakat tidak keberatan dengan dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.	79	3.95	Setuju
4.	Masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi lebih dalam kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso.	80	4.00	Setuju
5.	Saya merasa bahwa pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di Kecamatan Karangploso masih belum diperlukan.	58	2.90	Setuju
6.	Dengan langkah yang tepat, masyarakat Karangploso dapat menjadi masyarakat sadar wisata yang baik di masa depan.	80	4.00	Setuju
7.	Saya mendukung penuh Kecamatan Karangploso sebagai salah satu prospek pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang.	81	4.05	Sangat Setuju

(sumber : Olahan peneliti)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Kecamatan Karangploso saat ini masih belum begitu besar partisipasinya kepada kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso. Jika ada partisipasi nyata dari masyarakat, partisipasi tersebut hanya berupa kegiatan berdagang dan mencari keuntungan dari pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso. Masyarakat dalam jumlah yang lebih besar justru masyarakat yang berpartisipasi secara pasif. Masyarakat yang berpartisipasi secara pasif menganggap bahwa saat ini pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso masih belum menjanjikan untuk memulai usaha dan berinvestasi.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang bersama pengelola yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Donowarih tentunya memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembangunan fasilitas pariwisata tersebut murni untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Jika partisipasi masyarakat masih rendah, maka tujuan dari pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso ini tidak akan tercapai.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemerintah, pengelola, dan masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal tentang usaha pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Karangploso. Pertama, pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat kecil dalam upaya pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Hal ini dikarenakan pihak kecamatan Karangploso dan pihak Desa Donowarih menginginkan pengelolaan fasilitas pariwisata tersebut sepenuhnya dimiliki oleh mereka; Kedua, Pengelola sekaligus pemerintah Desa Donowarih telah mengagendakan beberapa upaya penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat agar lebih berperan aktif bagi kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso, namun sampai saat ini belum dilakukan karena berbagai alasan; Ketiga, masyarakat belum menerima bimbingan serta penyuluhan terkait pariwisata, sehingga mereka masih bingung tentang bentuk partisipasi apa yang dapat mereka lakukan. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat menjadi apatis terhadap pengembangan fasilitas di Kecamatan Karangploso.

Mengacu pada kesimpulan tersebut, peneliti menganalisis bahwa upaya pemerintah dan pengelola dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Meskipun pemerintah desa telah memiliki agenda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya dengan mengadakan bimbingan pariwisata bagi masyarakat, sampai saat ini peneliti pemerintah masih belum melakukan hal tersebut.

Alasan yang disampaikan oleh pengelola adalah kurangnya bimbingan dari Dnas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Selain itu, pengelola menganggap bahwa pembangunan fasilitas pariwisata tersebut masih belum dirampungkan, sehingga pengelola merasa kurang efektif jika bimbingan pariwisata dilakukan sekarang.

3. Analisis Persepsi Visitor tentang Fasilitas Parfiwisata di Kecamatan

Karangploso

Pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso memiliki tujuan untuk menarik wisatawan yang menuju Kota Wisata Batu ataupun wisatawan yang pulang dari Kota Wiasata Batu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu perencana dibangunnya *Rest Area* dan fasilitas pariwisata lain di Kecamatan

Karangploso, Bapak Djayusman, SH. MM. Beliau juga menjabat sebagai KASUBAG Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

“Rest Area Karangploso dan fasilitas lainnya memang dibangun di Karangploso dengan tujuan agar wisatawan yang dari atau akan menuju Kota Batu bisa mampir sejenak di fasilitas tersebut untuk sekedar beistirahat dan membeli oleh-oleh. Hal ini diharapkan agar masyarakat disana merasakan dampak positif dari perkembangan pariwisata Kota Batu”

(Wawancara, 15 September 2016)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Donowarih, Bapak Sujoko. Beliau sekaligus menjabat sebagai manajer *Rest Area* Karangploso.

“Rest Area Karangploso ini dibangun di tanah bengkok (kas) desa atas saran dari pak Bupati. Tujuannya agar masyarakat Donowarih khususnya mendapat penghasilan tambahan selain bertani dengan menjual berbagai oleh-oleh yang nantinya bisa ditawarkan kepada wisatawan yang pulang dari Kota Batu.” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Pernyataan dari para penggagas dan pengelola fasilitas pariwisata tersebut tentu telah menggambarkan dengan jelas alasan dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso yaitu mengambil peluang dari berkembangnya pariwisata di Kota Batu dengan harapan para wisatawan dapat berkunjung sejenak di Kecamatan Karangploso. Dengan demikian, peran wisatawan/pengunjung menjadi vital bagi *Rest Area* Karangploso.

Peneliti mencoba melakukan wawancara kepada beberapa *visitor Rest Area* Karangploso tentang pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso. Salah satunya adalah Bapak Hidayat, pengunjung asal Kota Malang yang menyempatkan diri mampir ke *Rest Area* Karangploso untuk membeli sesuatu di minimarket. Beliau berencana mengajak keluarganya berekreasi ke Kota Batu.

“Ya menurut saya sudah cukup baik ya. Jalanan juga sudah mulus, sudah lebih lebar. Kalau Rest Area ini sepertinya belum banyak dikunjungi ya. Mungkin karena banyak yang belum tahu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus.” (Wawancara, 10 November 2016)

Saat ditanya tentang dampaknya terhadap kelancaran berwisata, beliau justru menjawab tidak terlalu berpengaruh.

“Kalau pengaruhnya belum ada ya mas. Kan saya cuma dari Malang sini aja, sebenarnya nggak butuh Rest Area. Kesini tadi mampir beli rokok. Yang

berpengaruh besar itu jalannya. Dulu saya ingat masih sempit, banyak lubang. Sekarang sudah mulus.” (Wawancara, 10 November 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Zainur, wisatawan asal Pasuruan yang berkunjung *Rest Area* Karangploso. Beliau menyebut bahwa pembangunan *Rest Area* Karangploso bisa berkembang asalkan pembangunan segera diselesaikan.

“Sebenarnya bagus mas, cuman sepertinya belum selesai dibangun ya. Kalo memang dibangun agar menarik wisatawan seharusnya ada atraksi disini. Mungkin pertunjukan atau apa gitu yang bisa menarik wisatawan. Kalau cuma dibiarkan seperti ini kalo menurut saya nggak akan maksimal.” (Wawancara, 9 November 2016)

Beliau juga memberikan pandangan tentang dampaknya bagi kelancaran berwisata dirinya dan keluarganya.

“Berdampak baik mas. Kalo kita capek bisa istirahat disini. Disini juga ada warung-warung, jadi kalau mau makan bisa. Ada mushola juga kan ya. Jadi ya cukup memudahkan, hanya saja perlu diperbaiki lagi.” (Wawancara, 9 November 2016)

Pendapat lain disampaikan oleh Pak Abdur Ghofar. Beliau adalah wisatawan Kota Batu yang berasal dari Surabaya.

“Banyak yang harus diperbaiki ya, terutama dalam sisi promosi. Saya nggak tau apakah pengelola sudah melakukan promosi, tapi saya sebelumnya belum tahu kalau ada Rest Area disini. Seandainya saya lewat Kota Malang kan nggak tahu saya.” (Wawancara, 9 November 2016)

Pak Ghofur juga memberikan pandangannya tentang dampak terhadap kelancaran wisatanya.

“Ya lumayan untuk tempat istirahat. Disini juga banyak warung, jadi bisa sambil makan malam, ada mainan-mainan juga. Ya harapannya semoga lebih di tingkatkan terutama promosinya. Kalo ramai kan jadi senang juga masyarakat.” (Wawancara, 9 November 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Yahya, wisatawan asal Singosari Malang. Beliau mengunjungi *Rest Area* Karangploso justru karena penasaran dengan apa yang ada di *Rest Area* ini.

“Cukup bagus mas, tapi agak mengecewakan. Saya kira ada labirin-labirin gitu, ternyata belum tumbuh labirinnya. Disini juga ada tempat buat pertunjukan. Tapi pertunjukannya nggak ada. Mungkin pas akhir pekan ya baru ada. Tapi secara keseluruhan cukup bagus kok mas.” (Wawancara, 9 November 2016)

Beliau juga menyampaikan dampak pembangunan tersebut terhadap kelancaran berwisata.

“Dampaknya cukup bagus mas. Bisa jadi alternatif berwisata, ada mainan anak-anak juga disana. Tapi tentunya harus diperbaiki lagi. Karangploso ini kan juga mau ramai ya karena mau dilewati jalan tembusan Pasuruan-Batu, potensinya bagus ini mas.” (Wawancara, 9 November 2016)

Hasil wawancara dengan *visitor* tersebut menunjukkan bahwa *visitor* merasa cukup terbantu dengan dibangunnya *Rest Area* Karangploso dan fasilitas lainnya. Mereka merasakan dampak positif antara lain terdapat tempat untuk beristirahat bagi mereka yang telah menempuh perjalanan jauh, terdapat fasilitas ibadah dan toilet, adanya warung makan untuk pengunjung, serta mainan anak-anak yang dapat digunakan sebagai wisata alternatif. Namun, bagi sebagian *visitor* yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi, keberadaan fasilitas ini tidak cukup berdampak. Hal tersebut dikarenakan jarak yang mereka tempuh dari rumah ke Kota Batu tidak mengharuskan mereka untuk beristirahat.

Sementara itu, sesuai dengan hasil olahan data pendukung tentang persepsi pengunjung, latar belakang pengunjung pada fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso ternyata bukan hanya dari wisatawan yang akan mengunjungi Kota Batu, namun juga masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung yang menjawab tidak setuju dengan item pertama dalam indikator penelitian persepsi pengunjung. Demikian halnya dengan item tentang asal pengunjung yang menyebut bahwa tidak semua pengunjung berasal dari luar Malang Raya.

Ketidaksetujuan menjadi jawaban di item ketiga yang berarti fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso ini tidak dijadikan sebagai tempat tujuan dari rumah. Hal ini tergambar dalam tabel hasil olahan data pendukung sebagai berikut.

Tabel 24. Mean data kuantitatif untuk indikator persepsi pengunjung (*visitor*)

No.	Item	Total Skor	Mean	Keterangan
1.	Saya merupakan wisatawan yang berniat menuju Kota Batu dan menggunakan Rest Area ini sebagai tempat beristirahat.	89	2.96	Tidak tahu
2.	Saya merupakan wisatawan yang berasal dari luar Malang Raya.	60	2.00	Tidak tahu
3.	Saya sengaja mengunjungi Rest area Karangploso dan menjadikan Rest area Karangploso sebagai destinasi tujuan saya.	88	2.93	Tidak setuju
4.	Saya merasa inisiasi untuk membangun fasilitas pariwisata di Karangploso ini cukup tepat.	113	3.76	Setuju
5.	Saya mengakui bahwa fasilitas pokok (seperti toilet, mushola, gazebo) memiliki kondisi yang baik.	98	3.26	Tidak tahu
6.	Produk yang dijual di Rest Area Karangploso sesuai dengan kebutuhan saya.	111	3.70	Setuju
7.	Saya merasa pembangunan Rest area Karangploso sangat bermanfaat bagi wisatawan.	123	4.10	Setuju
8.	Pelayanan di beberapa Stand di Rest Area Karangploso cukup baik.	117	3.90	Setuju
9.	Fasilitas jalan raya di Kecamatan Karangploso sudah sangat baik.	129	4.30	Sangat Setuju
10.	Saya merasa perbaikan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso masih perlu dilakukan.	128	4.26	Sangat Setuju
11.	Saya mendapatkan apa yang saya harapkan dari Rest area Karangploso.	83	2.76	Tidak tahu
12.	Saya merasa bahwa atraksi wisata di Rest Area Karangploso perlu ditambah.	124	4.13	Setuju

Lanjutan Tabel 24

13.	Saya merasa promosi Rest Area Karangploso masih sangat kurang.	119	3.96	Setuju
14.	Saya setuju bahwa pengelola harus meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Rest area Karangploso kepada wisatawan.	123	4.10	Setuju
15.	Saya bersedia datang kembali ke Rest area Karangploso di lain waktu.	114	3.80	Setuju
Mean indikator Persepsi Visitor			3.59	

(Sumber : Hasil olahan peneliti)

Terkait pendapat pengunjung tentang dibangunnya fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, pengunjung menganggap bahwa inisiasi untuk membangun fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso cukup baik. Mereka mengaku pembangunan tersebut cukup membantu perjalanan wisata mereka, baik segi fasilitas yang ditawarkan maupun produk yang dijual disana. Fasilitas jalan raya yang baik juga menjadi apresiasi tersendiri dari para pengunjung.

Meski begitu, para pengunjung menganggap bahwa masih harus ada perbaikan menyeluruh terkait fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Perbaikan tersebut adalah dari segi pembangunan fisik yang masih belum rampung sepenuhnya, perbaikan sarana prasarana, serta penambahan atraksi yang ditawarkan. Selain itu, promosi dan sosialisasi terhadap wisatawan juga harus diperhatikan dan ditingkatkan guna menarik pengunjung lebih banyak. Meski banyak hal yang harus diperbaiki, nyatanya pengunjung sepakat akan datang lagi ke fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso di lain kesempatan.

Pengunjung (*visitor*) merupakan unsur penting bagi setiap usaha yang berhubungan dengan pariwisata. *Visitor* seolah menjadi nadi bagi setiap kegiatan wisata, karena dari *visitor*-lah pendapatan suatu kegiatan pariwisata didapat. Oleh karenanya, persepsi *visitor* menjadi hal yang perlu diperhatikan. Selain untuk

mengetahui apa alasan *visitor* untuk datang ke tempat tersebut, juga sebagai koreksi bagi pengelola agar tempat tersebut dapat diperbaiki di kemudian hari.

Sama halnya dengan tempat tujuan wisata, fasilitas pariwisata juga memerlukan pandangan dan persepsi dari *visitor*. Fasilitas pariwisata yang baik tentu mendapat persepsi yang baik pula dari *visitor*. Dengan persepsi yang baik, *visitor* akan dengan senang hati kembali ke fasilitas pariwisata tersebut dan bahkan mengajak rekan-rekannya yang lain.

Fasilitas pariwisata di Karangploso yang terpusat pada *Rest Area* Karangploso dibangun dengan tujuan menjaring wisatawan yang akan berwisata ke Kota Batu maupun masyarakat yang pulang dari Kota Batu. Tentunya wisatawan Kota Batu diharapkan menjadi *visitor* bagi *rest Area* Karangploso, sehingga persepsi wisatawan Kota Batu menjadi penting bagi *Rest area* Karangploso. Persepsi wisatawan tersebut dapat digunakan oleh pengelola sebagai koreksi dan masukan bagi *Rest Area* Karangploso dan fasilitas pariwisata di Karangploso pada umumnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para *visitor*, terdapat beberapa persepsi yang dirasakan oleh para *visitor*. Hampir semua *visitor* yang peneliti wawancarai menganggap bahwa pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso ini cukup bagus. *Visitor* juga mengapresiasi lengkapnya fasilitas yang dimiliki oleh *Rest Area* Karangploso seperti toilet, musholla, minimarket, dan lain sebagainya sebagai fasilitas yang cukup penting yang dapat dimanfaatkan oleh para *visitor*.

Selain sebagai sarana pelengkap demi kelancaran berwisata, *visitor* juga menganggap *Rest Area* ini sebagai tempat wisata alternatif. Walau begitu, perbaikan

secara menyeluruh mulai dari pembangunan yang belum rampung serta penambahan atraksi wisata diharapkan segera dilakukan oleh para pengelola. Salah satu *visitor* juga menyoroti kurangnya promosi dari pengelola tentang *Rest Area* Karangploso. *Visitor* menilai promosi yang gencar dapat menjadi solusi agar *Rest Area* Karangploso ini ramai dikunjungi.

3. Analisis Permasalahan yang Ditemukan oleh Peneliti

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat serta kondisi CBT di Kecamatan Karangploso masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya dampak positif sosial ekonomi masyarakat, dimana hanya masyarakat yang memiliki stand/usaha di *Rest Area* Karangploso dan fasilitas-fasilitas sekitarnya saja yang merasakan dampak tersebut. Disisi lain, mayoritas masyarakat, terutama yang berada jauh dari pusat Karangploso tidak merasakan dampak apapun atas pembangunan fasilitas Pariwisata di Kecamatan Karangploso yang erat kaitannya dengan pembangunan pariwisata di Kota Batu.

Tidak maksimalnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso tentunya memiliki permasalahan tersendiri. Permasalahan tersebut antara lain mencakup permasalahan internal yang terjadi antara pengelola dan pemerintah, serta kurangnya inisiatif kerjasama yang dilakukan oleh pengelola. Berikut merupakan penjabaran dari permasalahan tersebut:

a) **Adanya Miss Komunikasi antara pihak pengelola Rest Area Karangploso dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang**

Keharmonisan antara pengelola dan pemerintah menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh tempat usaha yang dibangun dengan asas masyarakat, begitupun dengan fasilitas pariwisata di Kecamatan Kecamatan Karangploso.

Kerjasama yang baik antara Desa Donowarih sebagai pengelola serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai pemerintah tentu sangat dibutuhkan bagi pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.

Dengan demikian, fungsi dari fasilitas tersebut dapat maksimal, serta berdampak positif bagi masyarakat keseluruhan.

Namun sepertinya kerjasama yang baik ini tidak tergambar dalam sistem manajerial Rest Area Karangploso yang merupakan pusat dari fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Hal ini seperti yang peneliti temukan dalam proses wawancara dengan pengelola Rest Area Karangploso yang diwakili oleh bapak Sujoko. Beliau mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan yang dialami oleh Rest Area Karangploso yaitu kurangnya perhatian dan bimbingan dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

“Kami telah memiliki program jangka panjang maupun jangka pendek, program tersebut antara lain mengadakan sosialisasi tentang Rest Area ini kepada masyarakat, salah satunya membagi stand secara adil di tiap-tiap dusun dan RT/RW. Tentunya kami membutuhkan bimbingan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk melakukan hal tersebut. Namun sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Malang.” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

“Kendala yang kami rasakan disini adalah tentang pendampingan dari Kabupaten. Memang pengelolaan sepenuhnya Rest Area Karangploso diserahkan kepada Desa, namun kami tetap membutuhkan pendampingan dari Kabupaten. Namun sampai sekarang pendampingan yang kami inginkan

belum diberikan oleh Kabupaten. Dan sampai sekarangpun pembangunan fisik Rest Area Karangploso masih ada yang kurang terkait pagar yang berada di belakang Rest Area itu juga masih kurang.” (Wawancara, 23 Agustus 2016)

Peneliti kemudian melakukan konfirmasi perihal pernyataan tersebut kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang diwakili oleh Bapak Djayusman, SH, MM. Dalam wawancara tersebut, beliau membantah telah diminta oleh pihak Desa Donowarih untuk memberika bimbingan tentang pariwisata.

“Rest Area Karangploso awalnya dibangun berdasarkan rekomendasi langsung dari bapak Bupati Malang yang kemudian dibahas bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebetulan terdapat tanah kas desa di desa Donowarih, sehinga Dinas Pariwisata membuat kerja sama dengan Desa Donowarih untuk membangun Rest Area Tersebut. Awalnya, pihak Dinas berencana mengelola Rest Areaa tersebut dengan konsep pariwisata layaknya beberapa desa wisata lain yang ada di Kabupaten Malang, seperti artraksi wisata setiap dua minggu sekali, promosi yang gencar, dan lain sebagainya. Namun secara mendadak, pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat Karangploso menginginkan pengelolaan penuh dipegang oleh kecamatan dan desa. Sempat ada perdebatan alot antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pemerintah Kecamatan Karangploso. Namun akhirnya Dinas mengalah, dan melepas pengelolaan ke kecamatan Karangploso. Hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, tidak ada perkembangan yang signifikan dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Rest Area Karangploso. Sebenarnya kami sudah memiliki rencana yang matang terkait mau dikemanakan Rest Area Karangploso ini. Namun karena egoisme dari pak camat sendiri, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami pernah membuat event disana dengan tujuan meramaikan Rest Area tersebut supaya dikenal wisatawan, namun pengelola disana tidak kooperatif dan mematok biaya mahal pada kami. Akhirnya kami menyerah dan tidak lagi membuat event disana.” (Wawancara, 15 September 2016)

“Sampai saat ini tidak ada yang menghubungi Dinas. Kami telah berusaha maksimal dengan menerapkan berbagai strategi yang juga telah kami terapkan ke beberapa desa wisata di Kabupaten Malang, tatapi pemerintah setempat tidak mendukung dan merasa mampu mengelola Rest Area tersebut secara mandiri. Sebenarnya bisa kita meniru apa yang telah diterapkan seperti di Bali, dimana arus kendaraan direkayasa sedemikian rupa agar melewati tempat-tempat baru. Namun kembali lagi, kurang mendukungnya pemerintah dan kepolisian setempat menjadi kendala tersendiri bagi kami.” (Wawancara, 15 September 2016)

Pernyataan dan klarifikasi tersebut menggambarkan adanya sistem yang kurang tepat dalam pengelolaan fasilitas pariwisata di Karangploso. Pengelola menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi oleh *Rest Area* Karangploso adalah kurangnya bimbingan dan pendampingan dari pihak pemerintah. Namun disisi lain, pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang merasa tidak diberikan tempat untuk ikut mengembangkan *Rest Area* tersebut. Pemerintah menganggap selama ini Dinas selalu dipersulit, sehingga pihak Dinas menyerah dan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak Desa. Pemerintah juga merasa bahwa sikap egois pihak pengelola itulah yang membuat *Rest Area* Karangploso ini tidak kunjung berkembang.

Permasalahan ini menjadi permasalahan yang paling menonjol dalam proses pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Statement dari pengelola menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada bimbingan dari pemerintah Kabupaten Malang kepada pengelola dalam upaya pengembangan *Rest Area* Karangploso. Sedangkan disisi lain, pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan bahwa selama ini pihak dinas tidak diberikan kesempatan oleh pengelola untuk ikut mengembangkan *Rest Area* Karangploso.

Peneliti menganalisis bahwa terdapat sebuah kesalahan komunikasi yang dialami oleh pengelola dan pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena pengelola *Rest Area* sendiri per Juni 2016 telah mengalami perubahan, termasuk menejerialnya. Memang saat awal-awal *Rest Area* dibangun, pihak dinas telah melakukan komunikasi kepada pengelola lama terkait kerjasama untuk mengembangkan *Rest*

Area Karangploso ini. Namun pengelola lama saat itu masih menolak dan ingin mengelola fasilitas pariwisata tersebut secara mandiri. Setelah terjadi mutasi pengelolaan kepada pihak Desa Donowarih, pihak pengelola baru mengharapkan adanya bimbingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun belum tersampaikan dengan baik. Terjadilah masalah *miss* komunikasi antara pengelola *Rest area* yang baru dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

Tentunya permasalahan ini diharapkan dapat diatasi secepatnya karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Perbaikan hubungan serta peningkatan intensitas komunikasi antara pengelola dan pemerintah menjadi kunci satu-satunya agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Masyarakat tentu berharap pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso ini dapat dilanjutkan secepatnya, sehingga tujuan pembangunan fasilitas pariwisata tersebut dapat tercapai dengan efektif.

b. Kurangnya kerja sama dari pihak pengelola fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso dengan Pemerintah Kota Batu maupun Kabupaten Malang

Pembangunan fasilitas pariwisata yang notabene diperuntukkan bagi kelancara wisatawan yang akan berwisata ke Kota Batu tentu membutuhkan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak. Selain pihak swasta, seperti *travel agent* maupun P.O., pihak pemerintah juga perlu dilibatkan dalam pengembangan *Rest Area*. Telah dijelaskan di point sebelumnya bahwa terjadi *miss* komunikasi antara pengelola dengan pemerintah Kabupaten Malang. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pengembangan fasilitas pariwisata di Karangploso.

Selain pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan pemerintah dari wilayah administratif dimana Kecamatan Karangploso berada, pemerintah Kota Batu juga selayaknya dilibatkan dalam proses pengembangan *Rest Area* Karangploso dan fasilitas lain. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso adalah untuk memfasilitasi wisatawan yang berangkat ke Kota Batu maupun yang pulang dari Kota Batu. Dengan dibangunnya fasilitas pariwisata tersebut, tentunya menciptakan kepentingan bagi pemerintah Kota Batu terhadap fasilitas pariwisata di Karangploso. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muljo Adji, Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pariwisata Kota Batu.

“Jika anda melewati Karangploso, anda akan menemukan Rest Area Karangploso. Nah ini adalah Rest Area yang dibangun oleh pemkab Malang untuk menjaring wisatawan yang akan berwisata ke kota Batu. Artinya apa, pemerintah daerah disini harus bekerja sama dalam satu kesatuan Malang Raya. Namun itu bukan wewenang kita. Semuanya sesuai rekomendasi dari pak walikota.” (Wawancara, 19 September 2016)

Beliau juga menyampaikan mengapa sampai saat ini kerjasama tersebut sulit dilakukan.

“Namun saat ini memang agak sulit untuk mewujudkannya, karena sentimen politik di tiga kepala daerah di Malang Raya dimana ketiganya dinaungi bendera politik yang berbeda. Inilah yang kita harapkan dapat diperbaiki kedepannya. Kita sudah sering mencoba koordinasi dengan dinas dan pengelola terkait di Kabupaten Malang, namun belum ada respon positif dari sana. Ya kita berharap lah supaya koordinasi dan saling mendukung antara satu sama lain ini bisa segera terwujud.” (Wawancara, 19 September 2016)

Peneliti juga mewawancarai pengelola *Rest Area* Karangploso terkait upaya kerja sama tersebut. Pengelola *Rest Area* Karangploso menyatakan telah menjalin

komunikasi berupa surat penawaran kerja sama, namun masih belum mendapat balasan dari Pemerintah Kota Batu.

“Ada. Rencana tersebut ada, namun sampai sekarang belum terealisasi. Kita juga telah membuat surat untuk walikota dan DISHUB kota Batu, namun belum mendapat respon.”(Wawancara, 23 Agustus 2016)

Hasil wawancara tersebut tentu memberikan gambaran bagaimana kondisi hubungan kerjasama antara pihak pengelola fasilitas pariwisata di Karangploso, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Wisata Batu yang ternyata masih belum berjalan dengan baik. Beberapa penyebabnya antara lain egoisme masing-masing pimpinan daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri, sentimen politik antar-kepala daerah, serta lambatnya respon pemerintah terhadap tawaran kerja sama. Permasalahan ini juga merupakan salah satu penyebab mengapa fasilitas pariwisata di Karangploso lambat dalam berkembang.

Kerjasama yang baik antar berbagai pihak terutama *stakeholder* menjadi kunci dalam suksesnya pengembangan suatu destinasi wisata, begitupun dengan fasilitas pariwisata. Pembangunan fasilitas pariwisata yang notabene diperuntukkan bagi kelancara wisatawan yang akan berwisata ke Kota Batu tentu membutuhkan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, pengelola, maupun masyarakat. Dengan dibangunnya kerjasama yang kuat antar stakeholder, pengembangan fasilitas pariwisata tersebut dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

Hal yang sama juga berlaku bagi fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Kerja sama yang baik antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan

menjadi hal yang wajib. Terlebih sampai penelitian ini dilakukan, fungsi dari *Rest Area* Karangploso sendiri masih belum maksimal. Salah satu yang menjadi sorotan peneliti adalah kerja sama pengelola fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso dengan pemerintah.

Seperti yang telah disampaikan oleh pihak terkait bahwa pembangunan *Rest Area* Karangploso ini memang bertujuan untuk menjangkau wisatawan yang datang ke Kota Batu maupun pulang dari Kota Batu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu harus turut dilibatkan dalam pengembangan fasilitas pariwisata di Karangploso ini.

Bagaimanapun, Kota Batu juga bergantung kepada Kecamatan Karangploso sebagai salah satu akses darat bagi wisatawan yang akan masuk ke Kota Batu.

Namun sampai penelitian ini dilakukan, masih belum ada upaya yang kongkrit dari kedua pihak untuk saling bekerjasama. Meskipun pihak pengelola mengaku telah mengirimkan surat kepada dinas terkait, masih belum ada jawaban yang diharapkan terkait kerjasama tersebut. Padahal, manfaat dari adanya kerjasama tersebut sangat besar untuk kedua pihak.

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh pengelola fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso dengan pemerintah Kota Batu dapat berupa kerjasama kebijakan, promosi, investasi dana, maupun pelatihan masyarakat. Jika kerjasama tersebut terlaksana dengan baik dan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak, maka pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso dapat lebih maksimal. Selain itu, hubungan antara Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dan Kota Batu bisa lebih harmonis.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata Kota Batu terhadap Kawasan Sekitar (studi pada Masyarakat Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Karangploso merasakan dampak sosial ekonomi akibat pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso, dimana sebenarnya fasilitas tersebut dibangun untuk menjangkau peluang dari berkembangnya pariwisata di Kota Batu.
2. Pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso berdampak langsung terhadap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, pembangunan fasilitas pariwisata tersebut merupakan dampak langsung dari pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Batu. Artinya jika diambil hubungan antara perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu, maka pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu berdampak secara tidak langsung terhadap masyarakat Karangploso.
3. Masyarakat Karangploso tidak merasakan dampak yang signifikan dari kunjungan wisatawan Kota Batu ke Karangploso. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki stand ataupun tidak berjualan di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Justru kebanyakan dampak sosial ekonomi yang



dirasakan oleh masyarakat berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya perubahan ekonomi yang dirasakan oleh pedagang makanan lebih dikarenakan oleh terkonsentrasinya masyarakat pada fasilitas pariwisata tersebut, sehingga membuat pedagang lebih mudah dalam menawarkan dagangannya.

4. Hasil pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan sosial yang dialami masyarakat Karangploso sebagai akibat dari pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu, yaitu :

- a) Perubahan kualitas hidup masyarakat
- b) Meningkatnya peran kepala desa dalam kehidupan sosial masyarakat
- c) Terjadinya potensi penyimpangan sosial.

5. Hasil pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan ekonomi yang dialami masyarakat Karangploso sebagai akibat dari pesatnya pengembangan pariwisata di Kota Batu, yaitu :

- a) Meningkatnya pendapatan masyarakat yang membuka usaha di sekitar fasilitas pariwisata
- b) Terciptanya kesempatan kerja
- c) Mendorong aktivitas wirausaha

6. Partisipasi aktif banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki stand di sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Masyarakat ikut membuka berbagai usaha seperti berdagang makanan, membuka taman bermain, ataupun menyewakan mainan untuk anak-anak. Partisipasi berupa usaha tersebut cukup menghidupkan kegiatan perekonomian sebagai bagian dari partisipasi aktif masyarakat lokal. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi bagi

pengembangan fasilitas pariwisata di Karangploso. Sedangkan partisipasi pasif masyarakat dapat ditemukan di sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki stand ataupun berjualan di sekitar fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Masyarakat tersebut umumnya merupakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Kecamatan Karangploso. Mereka tidak menolak terhadap pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso, namun mereka juga tidak banyak berpartisipasi terhadap pengembangan tersebut. Mereka merasa partisipasi masyarakat seperti mereka belum terlalu diperlukan karena fasilitas pariwisata di Karangploso masih belum ramai dikunjungi wisatawan.

7. Hasil pembahasan pada penelitian ini terkait peran serta pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata antara lain :

- a) Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat kecil dalam upaya pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso.
- b) Pengelola sekaligus pemerintah Desa Donowarih telah mengagendakan beberapa upaya penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat agar lebih berperan aktif bagi kegiatan pariwisata di Kecamatan Karangploso, namun sampai saat ini belum dilakukan karena berbagai alasan.

c) Masyarakat belum menerima bimbingan serta penyuluhan terkait pariwisata dari pemerintah, sehingga mereka masih bingung tentang bentuk partisipasi apa yang dapat mereka lakukan.

8. Hasil pembahasan pada penelitian ini terkait persepsi visitor menunjukkan bahwa hampir semua *visitor* yang peneliti wawancarai menganggap bahwa

pembangunan fasilitas pariwisata di Karangploso ini cukup bagus. *Visitor* juga mengapresiasi lengkapnya fasilitas yang dimiliki oleh *Rest Area* Karangploso seperti toilet, musholla, minimarket, dan lain sebagainya sebagai fasilitas yang cukup penting yang dapat dimanfaatkan oleh para *visitor*. Namun, *visitor* tetap mengharapkan perbaikan dalam berbagai fasilitas serta penambahan atraksi untuk menarik wisatawan.

9. Adanya *miss* komunikasi antara pihak pengelola *Rest Area* Karangploso dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang serta kurangnya kerja sama dari pihak pengelola fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso dengan Pemerintah Kota Batu menjadi permasalahan yang ditemukan dari penelitian ini sebagai hasil dari observasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata Kota Batu terhadap Kawasan Sekitar (studi pada Masyarakat Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha di sekitar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso sebaiknya meningkatkan kerja sama satu sama lain untuk mengembangkan potensi wisata di Kecamatan Karangploso agar fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso dapat digunakan secara maksimal oleh wisatawan. Jika penggunaan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso digunakan secara maksimal, maka dampak sosial ekonomi masyarakat terlebih dampak positif dapat ditingkatkan.

2. Pemerintah dan pengelola sebaiknya bekerja sama untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait kegiatan pariwisata dan apa saja yang dapat ditawarkan oleh masyarakat kepada wisatawan agar masyarakat yang masih berperan pasif dalam kegiatan pariwisata dapat ikut berpartisipasi lebih banyak sehingga dapat memperbaiki sosial ekonomi masyarakat secara lebih luas.
3. Pengelola sebaiknya menambah berbagai atraksi wisata di area fasilitas pariwisata Kecamatan Karangploso. Hal ini dimaksudkan untuk menarik wisatawan lebih banyak agar mau berkunjung ke fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Selain itu perbaikan fasilitas juga sangay diperlukan.
4. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Donowarih, Pemerintah Kecamatan Karangploso, Pemerintah Kabupaten Malang, serta Pemerintah Kota Batu agar saling bekerja sama dalam meningkatkan usaha pengembangan fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso. Kerjasama antar pemerintah tersebut menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan potensi fasilitas pariwisata di Kecamatan Karangploso serta mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Karangploso agar bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat.